



BIANGLALA BUDAYA

100 Tahun (1918-2018)
Kongres Kebudayaan
Menuju Kemajuan
Kebudayaan Bangsa

DARI KONGRES
PANCASILA
HINGGA KONGRES
KEBUDAYAAN
PEMUDA

Nunus Supardi

2/5



BIANGLALA BUDAYA

KONGRES KEBUDAYAAN

**Jilid
dua 02/05**

NUNUS SUPARDI

Bianglala Budaya Jilid 2:

Dari Kongres Pancasila hingga Kongres Kebudayaan Pemuda

©Nunus Supardi

Cetakan Pertama, November 2018

Penyunting

Ining Isaiyas

Perancang Sampul

Febrian Adi Putra

Perancang Infografis

Ashief Mutammimul Husna

Penata Letak

Jane Verawati

Ilustrasi

Jane Verawati

Foto untuk ilustrasi sampul diolah dari foto Konferensi Pendidikan 1949, koleksi ANRI, IPPHOS, No. 1396.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit

SUPARDI, Nunus

Bianglala Budaya Jilid 2:

Dari Kongres Pancasila hingga Kongres Kebudayaan Pemuda

Jakarta; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018

XVIII + 96 hlm.; 21 cm x 15 cm

**Untuk memperingati 100 tahun Kongres Kebudayaan (1918-2018)
menuju kemajuan kebudayaan bangsa**

Daftar Isi

Sekapur Sirih	VI
Pengantar Edisi Kedua	IX
Prakata Pemulung	XIII
Bab 1: Pendahuluan	02
Bab 2: Kongres Pancasila	04
Kongres Pancasila I	06
Kongres Pancasila II	08
Kongres Pancasila III	12
Kongres Pancasila IV	19
Kongres Pancasila V	21
Kongres Pancasila VI	25
Kongres Pancasila VII	27
Kongres Pancasila VIII	28
Kongres Pancasila IX	29
Kongres Pancasila X	30
Bab 3: Kongres Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Komunitas Adat dan Tradisi	32
Kongres Kebatinan I	34
Kongres Kebatinan II	35
Kongres Kebatinan III	35
Kongres Kebatinan IV	36
Kongres Kebatinan V	36
Kongres Kepercayaan terhadap Tuhan YME serta Komunitas Adat dan Tradisi	41

Bab 4: Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan	54
Kongres Pendidikan dan Pengajaran	56
Kongres Pendidikan I	56
Kongres Pendidikan II	57
Kongres Pendidikan III	57
Kongres Pendidikan dan Pengajaran Antar-Indonesia	59
Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan	68
Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan I	70
Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan II	76
Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan III	76
Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan IV	78
 Bab 5: Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia	 80
Latar Belakang	81
Pergerakan Kebangsaan adalah Pergerakan Pemuda	82
Gerakan Pemuda sebagai Gerakan Politik?	83
Gerakan Pemuda : Peran dalam Ekonomi & Kebudayaan	84
 Daftar Pustaka	 95
Tentang Penulis	96

Hilmar Farid

Direktur Jenderal Kebudayaan

Republik Indonesia

B*ianglala Budaya* karya Nunus Supardi ini sudah diterbitkan beberapa kali dalam versi-versi yang terus dimutakhirkan, mengikuti perkembangan penyelenggaraan kongres-kongres yang membahas permasalahan dan visi pembangunan kebudayaan Indonesia. Buku ini merupakan sebuah kompilasi catatan penting, yang telah berhasil memaparkan runutan periodik tentang bagaimana berbagai pemikiran dan perdebatan soal kebudayaan mengemuka pada setiap zaman. Buku ini tentunya merekam berbagai usaha menjawab tantangan zaman seiring dengan perkembangan masyarakat dan institusi negara. Sebagai kompilasi catatan, buku ini menyediakan pintu-pintu ke ratusan sumber sejarah untuk terus kita gali kembali dalam upaya merumuskan visi besar pemajuan kebudayaan Indonesia masa depan.

Penerbitan *Bianglala Budaya* dalam versi yang diperbarui tahun 2018 ini merupakan penanda bagi tiga momen penting dalam kronik panjang perjalanan kongres kebudayaan di Indonesia.

Momen pertama adalah peringatan 100 tahun diselenggarakannya *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling* pada 5-7 Juli 1918 di Surakarta. Kongres tersebut kemudian disepakati sebagai kongres pertama (masa prakemerdekaan) yang membicarakan, mengulas, dan memperdebatkan permasalahan-permasalahan budaya dari perspektif kebangkitan nasional, meski hanya spesifik kebudayaan Jawa. Dipengaruhi imbas besar *Ethische Politiek* dasawarsa sebelumnya, kongres ini mengedepankan pembahasan tentang kesadaran akan “ketimuran”, kebutuhan untuk mengejar peradaban Barat, pentingnya pendidikan terbuka bagi rakyat, sampai perumusan visi

pengembangan budaya Jawa. Kongres yang diketuai oleh R. Sastrowidjono ini telah membuka kotak Pandora wacana kebudayaan di kalangan para pendiri republik ini.

Momen kedua adalah peringatan 70 tahun diselenggarakannya Kongres Kebudayaan pertama setelah berdirinya Republik Indonesia, yang terjadi di Magelang pada 20-24 Agustus 1948. Diketuai oleh Mr. Wongsonegoro dengan dukungan Mr. Ali Sastroamidjojo (sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan RI), kongres diselenggarakan tidak lama sebelum agresi militer Belanda kedua pada akhir 1948. Bisa dibayangkan betapa tidak stabilnya keadaan saat itu, dan tetap saja kongres ini dilaksanakan dengan fasilitas serba terbatas; dengan dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, segenap anggota kabinet, serta budayawan dan seniman. Kongres inilah yang berhasil memberikan rekomendasi awal tentang pentingnya kebudayaan dalam pembangunan manusia Indonesia dan bagaimana posisi negara dalam mewujudkan hal tersebut.

Momen ketiga adalah diselenggarakannya Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 di Jakarta, 5-9 Desember 2018. Kongres ini adalah kongres kebudayaan pertama yang diselenggarakan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lahirnya undang-undang tersebut mengubah posisi negara dan relasinya dengan masyarakat dalam upaya pemajuan kebudayaan. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa Strategi Kebudayaan harus disusun dari proses pendataan dan perdebatan secara *bottom-up* dari tingkat kabupaten/kota, naik ke tingkat provinsi,

kemudian dirumuskan di tingkat nasional. Kali ini, Strategi Kebudayaan tidak dilahirkan oleh para pemikir besar, tapi merupakan hasil konsolidasi pemikiran atau hasil kecerdasan kolektif para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dari seluruh pelosok negeri. Dalam kongres ini juga untuk pertama kalinya Strategi Kebudayaan yang dirumuskan memiliki kekuatan hukum melalui penetapan oleh Presiden, yang kemudian akan menjadi dasar penyusunan dokumen-dokumen teknokratik kerja pemerintah seperti RPJPN, RPJMN, sampai RKP dan RKPD. Dengan kata lain: untuk pertama kalinya perspektif kebudayaan menjadi dasar pembangunan nasional.

Ketiga momen penting ini layak kita rayakan bersama. Melalui buku yang disunting kembali menjadi lima jilid ini, saya berharap kita semua dapat mempelajari riwayat kongres kebudayaan di Indonesia dan ikut merayakan ketiga momen penting itu lewat partisipasi dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Jakarta, 10 November 2018

Pengantar

Edisi kedua

Prof. Dr. Fuad Hassan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1985-1993

Banyak pendekatan dilakukan oleh para pemikir dan filosof untuk menjelaskan pembeda utama antara manusia dan hewan. Ada yang menekankan pembeda utama itu pada kecerdasan, ada pula yang menekankan pada ketangkasan-ketangkasan yang membuat manusia bisa melompat dari satu tahap kesanggupan ke kesanggupan lainnya. Namun, pada analisa akhirnya, pembeda utama antara kedua makhluk ini adalah adanya dimensi budaya dalam perkembangan manusia sebagai umat masyarakat maupun sebagai perorangan.

Hewan adalah makhluk alamiah murni. Mereka lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kaitan dengan lingkungan alamnya (*nature*). Manusia lahir, tumbuh, berkembang tidak hanya dalam kaitan dengan lingkungan alamnya, akan tetapi juga di bawah pengaruh lingkungan budayanya (*culture*). Demikian, maka ada alasan untuk menyebutkan, karena dalam kehidupan manusia itu berorientasi pada nilai budaya, maka hal itu menjadi keunggulannya di atas hewan. Kalau pada hewan orientasi itu ditekankan pada nilai bertahan diri (*survival*) belaka, pada manusia kehidupan dimaknai lebih dari sekedar bertahan diri; pada manusia orientasi dalam kehidupan diperluas oleh dimensi-dimensi yang memperkaya wawasan hidupnya seperti keindahan, keadilan, kesenangan.

Oleh karena adanya acuan pada nilai budaya itu, maka setiap bentuk kebersamaan manusia (misalnya dalam suku, masyarakat, bangsa), cenderung untuk berpedoman pada ukuran-ukuran (*nomos*) yang kemudian menjadi norma perilaku dalam kehidupan kebersamaan itu. Gagasan tentang baik-buruk, indah dan tidak indah, adalah gagasan-gagasan tentang skala

nilai-nilai, dan diterjemahkan dalam ukuran-ukuran norma sosial. Dengan demikian perikehidupan manusia mengacu pada aturan-aturan yang menjadi dasar konformisme sosial. Misalnya, ukuran tentang penggunaan tangan kiri dan tangan kanan adalah ukuran norma. Secara umum gambaran inilah yang menjadi pendukung dari sejarah peradaban.

Demikianlah, maka keunggulan manusia sebagai makhluk budaya menjelma dalam kehidupan yang beradab. Kita sebagai bangsa yang kebetulan atau ditakdirkan (*by incident*) meliputi beratus suku bangsa yang menggunakan beratus ragam bahasa dan menampilkan gaya hidup yang berakhir pada tradisi beragam, niscaya akan terus-menerus disibukkan oleh pemikiran tentang ikhtiar pengembangan kebudayaan Indonesia. Berpikir tentang pengembangan kebudayaan di Indonesia tidak akan berhenti dalam satu dua generasi. Kita harus menjalani kehidupan yang multikultural, dengan kesanggupan menyaksikan bahwa keberagaman itu justru kekayaan. Dasar yang diperlukan untuk sampai pada kesanggupan menjalani hidup dalam keberagaman adalah kesanggupan untuk menempatkan keberagaman sebagai kekayaan, kesanggupan untuk saling kenal, saling mengerti dan saling menerima. Dengan kenyataan ini kita sudah betul-betul diwajibkan untuk tidak melepaskan perhatian kita terhadap ikhtiar pengembangan kebudayaan nasional. Dalam hal ini patut kita junjung tinggi wawasan para pendiri bangsa yang mencantumkan Pasal 32 dan Penjelasannya dalam UUD 1945. Dengan pencantuman itu menunjukkan bahwa sejak semula para pendiri bangsa telah menempatkan urusan pengembangan kebudayaan sebagai komitmen konstitusional.

Perlu dijelaskan di sini, komitmen itu tidak dapat diabaikan oleh karena alasan pengembangan kebudayaan nasional harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang bisa dipersoalkan adalah bagaimana cara-cara komitmen itu diwujudkan. Dan itu menjadi tantangan bagi kita semua yang berminat terhadap ikhtiar pengembangan kebudayaan nasional. Dalam kaitan ini kita harus menyadari bahwa proses pengembangan kebudayaan bukan berarti sekadar beralih dari segala yang lama ke segala yang baru.

Dinamika kebudayaan bukan merupakan proses singkir-menyingkirkan apa yang lama dan kemudian menggantinya dengan yang baru. Menarik sekali untuk dicermati bahwa dinamika kebudayaan merupakan penjelmaan dari pertentangan antara dua daya, yaitu daya pelestarian (*preservative*) dan pengembangan (*progressive*). Oleh karena itu, dalam pembahasan tentang kebudayaan nasional kita perlu mencurahkan perhatian pada berbagai ikhwal kebudayaan, yaitu mana yang perlu dilestarikan dan bagian lain yang mana yang perlu dimajukan. Misalnya, dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan adalah upaya itu dapat “*mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.*”

Dalam hubungan dengan berbagai permasalahan kebudayaan seperti digambarkan di atas, dapat dimengerti jika dalam rentang waktu yang panjang (1918-2003) telah terselenggara beberapa kali Kongres Kebudayaan. Himpunan dari berbagai kegiatan kongres yang pernah diselenggarakan, dalam sebuah buku, merupakan ikhtiar untuk menyajikan perkembangan pemikiran tentang kebudayaan Indonesia secara umum dari waktu ke waktu. Kalau kita cermat membaca perkembangan pemikiran itu, akan terlihat adanya benang merah, adanya harapan dan cita-cita yang selalu diungkap kembali di samping memperbincangkan hal baru yang kontemporer. Namun demikian, terdapat pula kesan bahwa usulan-usulan dan saran-saran yang lagi-lagi muncul, menunjukkan karena usulan itu tidak ditindaklanjuti oleh instansi-instansi dan pihak-pihak yang seharusnya usulan itu dapat dijadikan andalan. Dalam pelaksanaan Kongres Kebudayaan yang terakhir (2003) juga terdapat kesan bahan yang telah diuraikan dan disepakati merupakan ulangan dari kongres sebelumnya. Ulangan-ulangan pembahasan itu menggambarkan bahwa bahan-bahan yang telah terhimpun kurang dijadikan acuan, sehingga berlangsungnya kongres itu dapat merupakan forum yang memperbincangkan bab-bab baru yang terlepas dari bab sebelumnya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau kemudian pada bidang-bidang kebudayaan diadakan kongres secara terpisah, seperti kongres Bahasa, Kongres Kesenian, yang fokusnya lebih jelas.

Dengan diupayakannya penerbitan buku ini patut disambut oleh khalayak pembaca yang berminat terhadap ikhtiar besar dalam mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan dihimpunnya bahan-bahan dokumenter Kongres Kebudayaan sepanjang 1918-2003, maka buku ini bisa menjadi sumber acuan yang komprehensif bagi peminat masalah budaya.

Jakarta, 6 Mei 2005

Pada 2018 ini, tepatnya tanggal 5 Juli 2018, Kongres Kebudayaan (Jawa) yang pertama resmi dibuka satu abad yang lalu. Kongres itu diberi nama *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*, atau Kongres Guna Membahas Pengembangan Kebudayaan Jawa. Pada dasarnya, inilah Kongres Kebudayaan (KK) I. Gagasan untuk menyelenggarakannya muncul dari seorang bumiputra, Pangeran Prangwadana atau Mangkunegoro VII. Kegigihan kaum bumiputra untuk mengganti perintah Batavia menyelenggarakan Kongres Bahasa (Jawa) menjadi Kongres Kebudayaan (Jawa) mencerminkan tumbuhnya kesadaran kaum terpelajar bumiputra untuk melawan hegemoni budaya penjajah Belanda yang berabad-abad mencengkeram pikiran kaum bumiputra.

Pilihan pada kongres, sebagai ajang para pemangku kebudayaan untuk membahas berbagai permasalahan kebudayaan guna menghasilkan suatu kesepakatan pada masa penjajahan Belanda, mencerminkan betapa besarnya kesadaran kaum pergerakan dalam menyiapkan lahirnya bangsa baru yang berjati diri kebudayaan baru, kebudayaan Indonesia. Tumbuhnya kesadaran berbangsa ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo (BO) pada 20 Mei 1908, sedangkan kesadaran berbudaya ditandai dengan KK 1918. Sepuluh tahun kemudian, bibit kesadaran itu tumbuh semakin besar dan membulat kuat. Melalui Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, hal itu secara bersama-sama diikrarkan sebagai suatu “sumpah” bersama untuk “mengaku berbangsa satu, Indonesia”, “bertanah air satu, Indonesia”, dan “menjunjung bahasa persatuan, Indonesia”. Tujuh belas tahun kemudian bangsa baru itu mencapai titik kulminasi, dengan gagah berani memproklamasikan diri sebagai bangsa merdeka, tepatnya pada 17 Agustus 1945.

Seratus tahun perjalanan KK kini telah meninggalkan rekam jejak yang sarat dengan konsep, kebijakan, dan strategi dalam memajukan kebudayaan bangsa, seiring dengan kemajuan zaman. Tujuan utama penulisan buku ini, selain untuk memperingati 100 tahun berlangsungnya KK pertama, juga untuk mengangkat dan memperkenalkan berbagai kongres sebagai peristiwa budaya yang selama ini masih terabaikan. Kongres maupun konferensi kebudayaan luput dari perhatian kita, baik dalam hal makna keputusan kongres maupun tindak lanjut sebagai bentuk realisasi keputusan kongres. Banyak sekali ide, gagasan, saran, dan pendapat yang pernah dilontarkan oleh para pendahulu kita yang dapat dijadikan bahan renungan dalam menyusun konsep, kebijakan, dan strategi pemajuan kebudayaan masa-masa selanjutnya.

Bukti bahwa kebudayaan dan KK memiliki peran penting dalam membangun rasa kebangsaan dan memajukan kebudayaan bangsa bertebaran di mana-mana. Pemulungan data dimulai sejak 1991 pada saat diselenggarakan KK di Taman Mini Indonesia Indah. Hasilnya diterbitkan dalam bentuk cetak sederhana, "Kongres Kebudayaan 1918-2003", sebagai bahan bacaan KK 2003 di Bukittinggi. Setelah itu, pemulung terus memulung dan merevisi buku tersebut. Selain telah berlangsung enam belas kali KK, ada kongres berbagai unsur kebudayaan, seperti: bahasa (Indonesia dan daerah), sastra (Indonesia dan daerah), linguistik, kesenian, sejarah, arkeologi, prehistori, perbukuan, perpustakaan dll. Berikutnya juga kongres bidang-bidang lain yang bukan unsur kebudayaan tapi terkait erat dengan masalah kebudayaan, misalnya kongres Pancasila, kongres pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, diaspora Indonesia, kebudayaan pemuda, kebudayaan daerah, dll. Dari rekaman jejak berbagai kongres itu dapat diidentifikasi berbagai konsep, kebijakan, dan strategi untuk memajukan kebudayaan bangsa.

Kesemuanya itu merupakan serpihan-serpihan yang dapat dijadikan bahan pelengkap untuk menggambarkan perjalanan sejarah kebudayaan bangsa. Maraknya kongres dan konferensi kebudayaan dan unsur-unsurnya,

setelah memasuki era Reformasi, menunjukkan peningkatan kesadaran para pemangku kebudayaan. Masing-masing suku bangsa seperti saling berlomba untuk menyelenggarakan kongres sendiri-sendiri: Jawa, Sunda, Minangkabau, Madura, Bali, Banjar, Aceh, dll. Di bidang bahasa berlangsung kongres bahasa Aceh, Lampung, Madura, Cirebon, Tegal, Makassar, Gorontalo, Inyong Banyumas dll. Di bidang sastra berlangsung kongres sastra Indonesia, sastra Jawa, kongres cerita pendek Indonesia, dll. Selain itu, juga ditemukan berbagai data baru baik dalam bentuk teks, foto, atau gambar. Pada 2013 terbitlah buku edisi III berjudul *Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan 1918-20013* dalam rangka menyongsong Kongres Kebudayaan Indonesia 2013. Untuk memperingati “100 Tahun Kongres Kebudayaan” dan menyambut KK 2018, pemulung pun menyiapkan data tambahan untuk melengkapi buku sebelumnya. Judul buku edisi IV ini mengalami penyesuaian menjadi *Bianglala Budaya: Rekam Jejak 100 Tahun Kongres Kebudayaan 1918-2018*.

Melalui penghimpunan data ini, diharapkan peristiwa-peristiwa budaya itu dapat diakui sebagai peristiwa bersejarah. Namun, masuk ke dalam buku sejarah atau tidak, KK tetap merupakan peristiwa sejarah yang penting. Putu Wijaya mengatakan dalam bukunya, *NgEH*, sebuah peristiwa bisa menjadi penting kalau dia mendapat ekspos. Tetapi sebuah peristiwa penting tidak dengan sendirinya menjadi tidak penting kalau tidak diekspos. Peristiwa budaya, meskipun tidak diekspos, menurut Putu, akan tetap penting. Suatu peristiwa budaya, meski telah berlangsung lama dan tidak diketahui banyak orang, akhirnya suatu saat akan diakui sebagai peristiwa penting, karena ia lebih merupakan pengalaman spiritual. Tanpa publikasi, ia bisa menunggu waktu, merambat terus perlahan-lahan, membangun sesuatu dalam diri manusia, kadangkala tanpa disadari oleh manusianya sendiri, sampai pada suatu saat sejarah akan “mendusin, terkejut dan buru-buru mencatatnya, kemudian diakui sebagai salah satu prasasti penting.”

Berbeda dengan edisi 2007 yang penyajiannya dalam satu buku, edisi baru ini, dengan pertimbangan kepraktisan, terbagi menjadi lima buku, yaitu

Jilid 1, 2, 3, 4, dan 5. Jilid 1 berjudul *Kongres Kebudayaan*. Isinya memaparkan KK masa penjajahan (1918-1945), KK sesudah Indonesia merdeka, dimulai dari masa awal kemerdekaan (1945-1965), masa pembangunan (1969-1998), dan masa Reformasi (1998 hingga sekarang). Jilid 2 berjudul *Dari Kongres Pancasila hingga Kongres Kebudayaan Pemuda*. Dalam buku ini dipaparkan hasil-hasil Kongres Pancasila 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2018. Jilid 3 berjudul *Dari Kongres Kebudayaan Daerah hingga Kongres Kesenian*. Bagian ini berisi gambaran tentang kongres-kongres yang berkaitan dengan kebudayaan seperti: kebudayaan daerah (Jawa, Sunda, Bali, Madura, Banjar, Minangkabau, dll), sejarah, arkeologi, antropologi, kesenian, perpustakaan, perbukuan, dll. Jilid 4 berjudul *Kongres Bahasa dan Sastra*. Pada buku ini dipaparkan seluruh kongres bahasa dan sastra Indonesia dan daerah yang pernah berlangsung, juga Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu yang diselenggarakan oleh pemerintah Malaysia. Terakhir, Jilid 5 berjudul *Catatan Rekam Jejak*. Setelah menjelajahi 100 tahun Kongres Kebudayaan beserta kongres-kongres lainnya, buku ini memaparkan benang merah yang menghubungkan seluruh kongres.

Beberapa kesulitan dalam menghimpun data akhirnya dapat teratasi berkat bantuan berbagai pihak. Berkat bantuan rekan-rekan di Museum Sonobudoyo, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPNST) Bandung, BPNST Pontianak, BPNST Banda Aceh, Balai Bahasa Aceh, Balai Bahasa Jawa Timur, Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, Pusat Dokumentasi H.B. Jassin, Balai Bahasa Lampung, Lembaga Basa Jeung Sastra Sunda (LBSS), Dinas Kebudayaan Bali, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Selatan, Lembaga Sensor Film, Badan Kerja sama Kesenian Indonesia (BKKI) Jakarta, Lingkar Budaya Indonesia (LBI), KITLV di Belanda, Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada, dan Perpustakaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, buku ini menjadi semakin kaya. Kepada semua lembaga itu pemulung mengucapkan terima kasih.

Dalam kesempatan ini pemulung secara khusus sekali menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada almarhum Prof. Dr. Fuad Hassan, yang atas kehendak beliau sendiri memberikan “Pengantar” untuk buku Edisi II, yang sengaja pemulung kutip lagi untuk edisi ini. Dengan suara parau dan sambil berbaring sakit di tempat tidur, beliau mendiktekan kata demi kata dan baris demi baris pengantar tersebut. Juga secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Adiwoso, Sdr. Sudarmadji Damais, Sdr. Chandra Halim yang dengan sabar dan tulus membantu meluruskan dan menerjemahkan teks dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia.

Ucapan terima kasih juga pemulung sampaikan kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan yang telah mengapresiasi dengan penerbitan buku ini. Selain itu, terima kasih pula kepada tim penyunting: Ninus Andarnuswari, Isaiyas Ining, Fitri Ratna Irmalasari, dan Dewi Kharisma Michellia yang telah bekerja keras merapikan halaman demi halaman, berikut tim desain yang dipimpin oleh Febrian Adi Putra. Terakhir, kepada istriku tercinta, anak dan cucu-cucu, juga pemulung ucapkan terima kasih yang paling dalam karena, selain terus memberikan semangat untuk menyelesaikan buku ini, juga telah merelakan suami, ayah, kakek selama berbulan-bulan”menikahi” komputer dan buku.

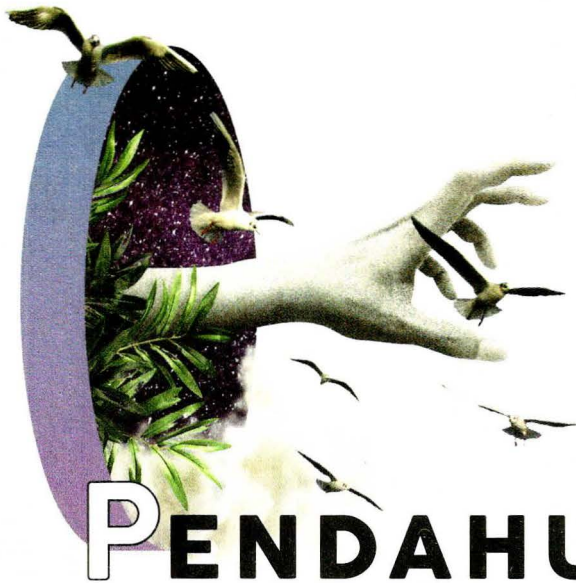
Angan-angan untuk terus merevisi buku edisi pertama 2003 yang tebersit lima belas tahun lalu akhirnya pada 2018 dapat tercapai. Diiringi ucapan syukur “Alhamdulillah Robbi” buku ini dapat terbit meskipun masih banyak kekurangan dan kelemahannya, terutama kelengkapan data dari beberapa kongres. Mudah-mudahan buku ini dapat membuat kita mendusin dan mengakui seluruh perjalanan KK selama 100 tahun sebagai peristiwa penting bagi sejarah kebudayaan Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 2018

Pemulung
Nunus Supardi

Jilid dua 02/05





BAB

01

PENDAHULUAN

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup yang seharusnya sudah menyatu dalam diri setiap anak bangsa ternyata mulai dirasa terabaikan. Di level institusional dan kebijakan hidup bersama, terutama terkait sila pertama dan keempat, fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar terasa kian merongrong pokok Pancasila. Di tingkat akar rumput kondisi tidak jauh berbeda.

Maka, sebagian warga bangsa bersama aparat pemerintah yang punya kepedulian mulai bergerak. Mereka menyelenggarakan antara lain Kongres Pancasila, Kongres Kepercayaan terhadap Tuhan YME serta Komunitas Adat dan Tradisi, Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, serta Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia. Sekalipun mengambil nama dan penekanan yang berbeda, tiap-tiap kongres ini sebenarnya berakar dari keprihatinan yang sama. Disatukan oleh

saling silang di ranah kebudayaan dalam arti luas, empat macam kongres tersebut bermaksud mengingatkan agar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita senantiasa

menengok kembali

lima butir dasar

**yang kita sepakati
sewaktu mendirikan**

Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

ialah

PANCASILA!





Setelah memasuki era Reformasi, Pancasila sebagai dasar, falsafah, pandangan hidup, dan acuan dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dinilai belum dipahami, dihayati, dan diamalkan secara nyata. Muncul kecenderungan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi sesuai kepentingan penguasa dan penafsir. Pancasila tidak lagi digunakan sebagai pedoman hidup bangsa. Sedikit demi sedikit mulai muncul indikasi degradasi nilai-nilai luhur Pancasila. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila mulai marak terjadi di masyarakat dan di pemerintahan. Apabila dibiarkan, fenomena ini dapat berakibat sangat fatal bagi kelangsungan hidup bangsa, bahkan dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia yang telah lama dibina dan dikembangkan.

Didorong oleh keprihatinan serius tersebut, Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada/PSP UGM melakukan berbagai kajian untuk merumuskan suatu formula dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila di masa depan. Salah satu program yang ditempuh ialah menyelenggarakan Kongres Pancasila. Dalam hal ini PSP UGM mendapat dukungan dari Mahkamah Konstitusi, yang juga merasakan keprihatinan yang sama.

Ketua MK Mahfud MD berpandangan, yang paling membahayakan negara dan bangsa kini bukan hanya korupsi uang atau kekayaan negara, melainkan juga korupsi pembuatan peraturan dan kebijakan. Apabila korupsi semacam ini terus terjadi, akan timbul kasus korupsi yang berkesinambungan.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X ternyata juga punya kekhawatiran yang sama. Beliau menyatakan, “Sekarang ini tidak ada lagi lembaga yang menangani aplikasi Pancasila. Bahkan, di dalam pendidikan pun Pancasila bukan lagi menjadi pelajaran wajib. Jika Pancasila tidak lagi menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat, berarti secara sengaja atau tidak sengaja [kita] telah meminggirkan Pancasila sebagai ideologi negara.”

Merespons berbagai suara dan kekhawatiran masyarakat, PSP UGM berinisiatif menyelenggarakan Kongres Pancasila. Gambaran sepuluh Kongres Pancasila yang pernah diselenggarakan ialah sebagai berikut.



Kongres Pancasila I

Tema

Meneguhkan, Mereaktualisasikan, dan Merevitalisasikan Nilai-nilai Pancasila Menuju Terwujudnya Indonesia yang Modern, Demokratis, Adil, dan Sejahtera.

Tempat & Tanggal

Yogyakarta, 31 Mei–1 Juni 2009.

Tokoh/Penyelenggara

PSP UGM

Mahkamah Konstitusi.

Hasil



Buku *proceeding* Kongres Pancasila pertama yang berlangsung di Yogyakarta pada 30 Mei-1 Juni 2009 bertajuk “Pancasila dalam Berbagai Perspektif”.

Deklarasi Bulaksumur

Bahwa sesungguhnya negara Republik Indonesia berdiri dengan harapan: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Harapan tersebut berpijak pada falsafah dan visi kebangsaan yang dibangun atas dasar pengalaman kesejarahan dan kerohanian, kemajemukan Indonesia dengan posisi strategisnya dalam pergaulan antarbangsa, dan dinamika perkembangan bangsa. Maka, disusunlah suatu konsensus dasar kenegaraan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Bahwa dengan karunia kemerdekaan dan segala anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada bangsa Indonesia, pelbagai usaha pembangunan dan reformasi masih menyisakan kesenjangan yang lebar antara harapan-harapan ideal dan kenyataan. Keberagamaan tidak mendorong keinsyafan beretika, globalisasi tidak mengasah kepekaan kemanusiaan, kemajemukan tidak memperkuat daya toleransi dan sinergi, demokrasi tidak membawa pemberdayaan dan kedaulatan rakyat, kekayaan alam tidak menghasilkan kemakmuran yang berkeadilan.

Dengan didorong oleh keinsyafan bahwa jalan kemajuan suatu bangsa hanya akan terwujud apabila senantiasa berpegang teguh pada jati dirinya, maka Universitas Gajah Mada bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merasa perlu menjaga komitmen terhadap Pancasila dengan menyelenggarakan Kongres Pancasila di kampus Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kongres yang diikuti oleh berbagai komponen bangsa akhirnya sepakat menyatakan pendirian dan aspirasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pancasila merupakan sistem nilai filsafati terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar dan acuan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan oleh karenanya segenap komponen bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi, menjaga, mengaktualisasikan, dan membela Pancasila.
2. Pancasila adalah sistem nilai fundamental yang harus dijadikan dasar dan acuan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dalam rangka mewujudkan visi bangsa yakni Indonesia yang sungguh-sungguh merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

3. Pancasila adalah dasar negara, oleh karenanya Pancasila harus dijadikan sumber nilai utama dan sekaligus tolok ukur moral bagi penyelenggaraan negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memelihara, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kebudayaan, maupun aspek-aspek kehidupan lainnya.
5. Negara harus bertanggung jawab untuk senantiasa membudayakan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan Pancasila di semua lingkungan dan tingkatan secara sadar, terencana, dan terlembaga.

Yogyakarta, 1 Juni 2009

Peserta Kongres Pancasila

Kongres Pancasila II

Tema

Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila dalam UUD 1945 dan Implementasinya.

Tempat & Tanggal

Denpasar, 1 Juni 2010.

Tokoh

Dr AB Kusuma

Prof. Dr Suhartono W Pranoto

Prof. Dr Ketut Rinjin

Prof. Dr Kaelan, MS

Prof. Dr Sastrapratedja, SJ

Prof. Dr Sudjito, SH, Mhum

Prof. Jawahir Thontowi, SH, PhD

Prof. Dr Lukman Saifuddin

Dr AAGN Ari Dwipayana

Prof. Dr Katjung Maridjan

Prof. Dr Tjipta Lesmana

Prof. Dr Gde Parimarta

Hasil

Deklarasi Kongres Pancasila II

Kongres Pancasila II di kampus Universitas Udayana sepakat mengeluarkan deklarasi sebagai berikut:

1. Pancasila yang lahir pada 1 Juni 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan urutan. Kerancuan tentang sejarah Pancasila mengharuskan perlu adanya pelurusan sejarah dan selanjutnya dilakukan sosialisasi yang benar.
2. Sejarah menunjukkan bahwa implementasi dan konsistensi Pancasila mengalami pasang-surut yang disebabkan oleh faktor internal, eksternal, dan komitmen pemimpin nasional. Oleh karena itu, pemimpin nasional sudah seharusnya memegang teguh nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara.
3. Pasca reformasi nilai-nilai Pancasila terpinggirkan dalam sistem hukum nasional. Perlu membangun rumah hukum Pancasila dengan upaya yang lebih progresif, yakni dengan merestorasi paradigma

ilmu hukum di Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila.

4. Diperlukan institusi yang mempunyai legitimasi di tingkat nasional yang memelihara, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila yang terbuka bagi pemikiran kritis terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan semangat dan tantangan zaman akan sangat penting bagi pembangunan karakter bangsa dan mencegah adanya generasi Pancasila yang hilang.
5. Pertarungan kepentingan yang berbasis fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama yang merasuk dalam produk legislasi dan regulasi menjadikan prinsip kehidupan berbangsa tidak lagi mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Untuk itu perlu gerakan penguatan dan pengawalan ideologi Pancasila, khususnya dalam politik legislasi pada saat ini.

Denpasar, 1 Juni 2010

Peserta Kongres Pancasila II

Latar Belakang, Konteks, dan Pelaksanaan

KP II masih dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dinilai masih jauh dari nilai-nilai Pancasila. Belum ada konsistensi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Komitmen para pemimpin nasional mencanangkan Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, menunjukkan awal yang baik bagi bangsa Indonesia untuk membangun identitas nasional sebagai bangsa yang bermartabat dan maju.

Dihadiri dan didukung oleh sejumlah pejabat serta tokoh nasional—antara lain Ketua MPR RI, Wakil Ketua I MPR RI, Wakil Ketua II MPR RI, Sekjen MPR RI, Direktur Pusat Departemen Dalam Negeri, pejabat Lemhanas, perwakilan MK, gubernur, serta bupati sejumlah daerah—Kongres Pancasila II dibagi menjadi

empat sidang pleno. Narasumber dan pokok bahasan tiap pleno ialah sebagai berikut:

Sidang Pleno I

Topik:

Tinjauan historis atas konsistensi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Narasumber:

Dr AB Kusuma

Prof. Dr Suhartono W Pranoto

Sidang Pleno II

Topik:

Tinjauan filosofis atas prinsip-prinsip penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam UUD 1945 dan implementasinya.

Narasumber:

Prof. Dr Ketut Rinjin

Prof. Dr Kaelan, MS

Prof. Dr Sastrapratedja, SJ

Sidang Pleno III

Topik:

Tinjauan yuridis-konstitusional atas konsistensi nilai-nilai Pancasila dalam amandemen UUD 1945 dan proses legislasi.

Narasumber:

Prof. Dr Sudjito, SH, Mhum

Prof. Jawahir Thontowi, SH, PhD

Prof. Dr Lukman Saifuddin

Sidang Pleno IV

Topik:

Tinjauan sosio-kultural atas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara

Narasumber:

Dr AAGN Ari Dwipayana

Prof. Dr Katjung Maridjan

Prof. Dr Tjipta Lesmana

Prof. Dr Gde Parimarta

Kongres Pancasila III

Tema

Harapan, Peluang, dan Tantangan Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila.

Tempat & Tanggal

Surabaya, 31 Mei–1 Juni 2011.

Tokoh/Penyelenggara

Pusat Studi Pancasila UGM

MPR RI

Universitas Airlangga.

Hasil

Deklarasi Surabaya

Peserta Kongres Pancasila III menengarai bahwa negara pada saat ini dalam situasi krisis yang sudah tahap kritis. Situasi krisis tersebut sebagai akibat kegagalan kita dalam membudayakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, falsafah hidup bangsa, dan pemersatu bangsa dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Berdasarkan hal di atas, maka seluruh peserta Kongres Pancasila III yang berlangsung pada 31 Mei dan 1 Juni 2011 di kampus Universitas Airlangga Surabaya mendeklarasikan:

1. Nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan bangsa sangat tergantung pada pembudayaan Pancasila dari generasi ke generasi secara berkesinambungan. Peserta Kongres berkomitmen untuk mengupayakan dan mendukung usaha berbagai pihak dalam merintis dan mengembangkan substansi serta metode dan strategi pembudayaan Pancasila. Pendidikan Pancasila wajib melaksanakan pembelajaran nasional terutama secara komparatif, historis, ideologis, dan filosofis di tengah pertarungan fundamentalisme agama dan pasar.
2. Pembudayaan Pancasila bersifat wajib bagi: (1) para penyelenggara negara agar mereka menjadi teladan dalam pengamalan dan pengamalan nilai Pancasila; (2) semua partai politik selaku salah satu pilar demokrasi dan juga organisasi masyarakat wajib melaksanakan pembudayaan Pancasila bagi pengurus dan anggotanya; (3) masyarakat pers dan dunia usaha sebagai pilar penting dalam pembangunan kemandirian bangsa wajib melaksanakan pembudayaan Pancasila bagi pengurus dan anggotanya; (4) seluruh warga negara—pembudayaan dilakukan dengan metode edukasi dalam arti luas, kontekstual, inovatif, partisipasi aktif; juga dengan cara yang berakar pada kearifan lokal dan budaya nasional serta dimulai dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga perguruan tinggi di lingkungan keluarga dan masyarakat.
3. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi dasar kehidupan bernegara dan harus tercermin dalam UUD'45 dan produk hukum di bawahnya. Pembudayaan Pancasila diselenggarakan di tingkat nasional, regional (ASEAN), dan internasional, karena Pancasila mengandung nilai universal.
4. Negara harus jelas dan tegas dalam menjalankan politik pendidikan nasional berdasar Pancasila, untuk itu mata pelajaran Pancasila secara mandiri harus dimasukkan dalam kurikulum di seluruh jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Pendidikan Pancasila juga

wajib dikembangkan dalam program yang bersifat kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan uji aturan hukum (*judicial review*) atas Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 karena tidak mencantumkan subtransi pendidikan Pancasila secara mandiri.

5. Pembudayaan Pancasila harus terstruktur, terencana, dan berkelanjutan. Oleh karena itu mendesak untuk segera dibentuk lembaga nasional yang diberi tanggung jawab khusus. Lembaga tersebut adalah: Komite Nasional Pembudayaan Pancasila dan UUD 1945, dibentuk dengan instruksi presiden dan kemudian ditingkatkan dalam bentuk undang-undang tentang Dewan Nasional Pembudayaan Pancasila dan UUD 1945.
6. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Surabaya, 1 Juni 2011

Peserta Kongres Pancasila III

Pelaksanaan Acara

Kongres Pancasila III juga didukung oleh beberapa perguruan tinggi di Surabaya serta melibatkan guru, dosen, peneliti, mahasiswa, birokrat, legislator, politikus, serta tokoh masyarakat. Persidangan diatur sebagai berikut:

Sidang Pleno I

Topik:

Revitalisasi dan reinterpretasi nilai-nilai Pancasila

Narasumber:

Prof. Dr Aloys A Nugroho

Dr Soekarwo

Prof. Dr Ayu Sutarto

Prof. Dr Puruhito

Sidang Pleno II

Topik:

Aktualisasi, sosialisasi, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila

Nasumber:

Prof. Dr Nursyam, Msi

Prof. Dr Muchlan Samani

Sidang Pleno III

Topik:

Pelembagaan dan pengelolaan pembudayaan nilai-nilai Pancasila

Narasumber:

Prof. dr Sam Suharto

Prof. Dr Sofian Effendi

Prof. Dr Jimly Assidqiy

Sidang Pleno IV

Topik:

Dinamika praktik kehidupan berpancasila di masyarakat

Narasumber:

Prof. Dr Syafii Ma'arif;

Pdt. Simon Filantropa Budi Santoso

Setelah sidang pleno, diadakan sidang per komisi. Komisi dibentuk dan dinamai mengikuti empat topik yang diangkat. Lalu, setelah sidang pleno kedua hari pertama diselenggarakan presentasi dalam panel. Dibentuk enam panel yang mendiskusikan tiga topik pertama materi sidang masing-masing dalam dua kelompok.

Kongres Pancasila III
Surabaya, 31 Mei–1 Juni 2011

Setelah mencermati pidato kunci wakil ketua MPR RI, pemaparan dan diskusi para panelis, serta aspirasi yang berkembang selama sidang pleno dan sidang komisi Kongres Pancasila III, dihasilkan perumusan sebagai berikut:

1. Pancasila digali dari nilai empiris-ideal bangsa yang berbhinneka tunggal ika, dengan pengakuan dan penerimaan akan perbedaan aspek kebudayaan dan beragama. Perbedaan dimensi ideologis, politis, ekonomi, sosial, dan kultural terstruktur dalam nilai kesetaraan yang mewujudkan semangat gotong royong, toleransi, dan kearifan lokal.
2. Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan komitmen seluruh penyelenggara dan warga negara.
3. Negara pada saat ini sedang gawat karena kita membiarkan Pancasila. Kegawatan tersebut dipicu oleh perubahan sistem norma setelah terjadi amandemen UUD 1945 yang di dalamnya tinggal 25 pasal asli dan ditambahi 174 pasal baru. Hal itu menimbulkan kekacauan sistem kelembagaan; lembaga negara tidak berfungsi optimal, bahkan malfungsi dan disfungsi, sehingga dalam menjalankan tugas terjadi tumpah tindih dan ada tugas yang terlantar. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang bisa melakukan pembudayaan ideologi. Lembaga ini juga selayaknya punya fungsi pendidikan dan pengkajian Pancasila serta kontrol kebijakan atas peraturan hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam situasi krisis sekarang ini, dasar hukum bagi pendirian lembaga tersebut tidak harus dengan UU baru, tetapi cukup dengan instruksi presiden yang disertai petunjuk teknis pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila dan UUD 1945.
4. Pancasila harus memimpin dan mengarahkan bangsa dalam situasi

yang gawat sekalipun, artinya menjadi dasar statis dan bintang petunjuk arah negara dan bangsa.

5. Nilai-nilai Pancasila diajarkan tidak hanya sebagai mata pelajaran Pancasila yang mandiri tetapi juga diintegrasikan pada semua pelajaran, disesuaikan dengan materi masing-masing.
6. Keteladanan nilai-nilai Pancasila harus dimulai dari organisasi terkecil (keluarga) dengan cara pembiasaan kehidupan sehari-hari, sekolah, masyarakat, dan bangsa.
7. Pengejawantahan nilai-nilai Pancasila perlu dirumuskan dengan cara yang sederhana pada pelbagai level pendidikan mulai dari PAUD sampai pendidikan tinggi.
8. Pembudayaan Pancasila bersifat wajib bagi penyelenggara negara, partai politik, masyarakat pers dan dunia usaha, serta seluruh warga.
9. Selain melalui pendidikan, pembudayaan Pancasila dijalankan melalui pendekatan budaya dan keteladanan para penyelenggara negara.
10. Dalam era globalisasi ini, ada penjajahan pola pikir yang tidak disadari dan lebih gawat penjajahan itu merambah pada para akademikus yang turut serta memberi masukan dalam pengambilan kebijakan di ranah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan pertahanan-keamanan.
11. Lima prinsip Pancasila cocok dimasukkan dalam piagam ASEAN menuju Komunitas ASEAN 2015, sehingga terwujud komunitas yang menjamin keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan.

Rekomendasi

1. Dengan melihat situasi gawat seperti sekarang ini, pembudayaan Pancasila harus segera dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara negara dan warga negara.
2. Mengusulkan kepada Presiden RI untuk segera membentuk lembaga Pembudayaan Pancasila dan UUD 1945.

Agenda Aksi

1. Mendorong tumbuh kembang komunitas, paguyuban, atau organisasi yang terajut dalam jaringan pembudayaan Pancasila secara nasional yang sistematis, sinergis, dan berkelanjutan.
2. Membangun jaringan komunikasi pembudayaan Pancasila melalui pertemuan-pertemuan, *mailing list*, situs web, Facebook, Twitter, dan jejaring sosial lainnya. Hal ini dikembangkan dalam rangka memberikan berbagai informasi tentang kegiatan penelitian, model, metode, dan strategi pembudayaan Pancasila di seluruh Indonesia yang sesuai komunitas masing-masing.

Tim Perumus Kongres Pancasila III

Prof. Dr Sutaryo, SpA(K) (UGM)

Prof. Dr Suhartono Taat Putra (UA)

Dr Bambang Kusbandrijo (Untag)

Sindung Tjahyadi, MHum (UGM)

Dr Soedarso (ITS)

Dr Lukas Sugiarto (Unesa)

Dr Agus Subiyanto (UHT)

Dr Bambang Supriyadi (UWK).



Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji, wakil ketua MPR Ahmad Farhan Hamid, dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie (kiri ke kanan) menjadi pembicara dalam Kongres Pancasila IV, 2012 di kompleks Gedung DPR, Jakarta. (Dari *Kompas*/Riza Fathoni)

Kongres Pancasila IV

Tema

Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia.

Tempat & Tanggal

Yogyakarta, 31 Mei–1 Juni 2012.

Tokoh/Penyelenggara

MPR RI

MK

PSP UGM.

Hasil

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kongres Pancasila IV

Yogyakarta, 31 Mei–1 Juni 2012

Setelah mempertimbangkan secara terpadu isi pidato ketua panitia, sambutan rektor, pidato kunci ketua MK RI, materi para narasumber, aspirasi yang berkembang dalam sidang pleno dan komisi, makalah *call for papers*, dan sumbangan pemikiran tim perumus, maka diperoleh kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Pancasila sebagai dasar filsafat negara, ideologi negara, dan pandangan hidup yang merupakan sumber nilai, inspirasi, dan dasar interpretasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara wajib diaktualisasikan ke dalam proses dan seluruh produk perundang-undangan dan berbagai kebijakan penyelenggaraan negara.

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan dan dasar negara yang merupakan kerangka acuan negara Indonesia. Strategi

pelembagaannya menuntut pembedaan antara pelembagaan melalui negara dan di masyarakat.

Pancasila merupakan perpaduan unsur cipta, rasa, dan karsa budaya bangsa Indonesia, sehingga tidak ada satupun yang bertentangan dengan kebhinnekaan subbudaya dan agama di Indonesia. Dalam rangka strategi pelembagaan, Pancasila perlu ditransformasikan secara kritis, rasional, dan kontekstual menjadi norma-norma yang berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman ke arah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai semuanya, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Langkah strategi umum

Dalam skala nasional diperlukan lembaga khusus dan independen yang berwenang sebagai pembina, pengembang, dan pembudaya nilai-nilai Pancasila.

Langkah strategis khusus

- Dalam bidang sosial, budaya, dan agama, pemerintah wajib mendorong dan memfasilitasi pembentukan pusat-pusat pendidikan dan pembudayaan Pancasila secara mandiri, kreatif, dan dinamis.
- Dalam bidang hukum, politik, dan pertahanan keamanan, Pancasila wajib dijadikan sumber materiil dan sumber nilai untuk penyusunan dan peninjauan peraturan perundang-undangan, kebijakan politik, dan strategi pertahanan keamanan.
- Dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan, Pancasila wajib dijadikan asas bagi sistem perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia melalui peninjauan kembali berbagai kebijakan dan produk perundangan agar terwujud kembali sistem ekonomi Pancasila.

B. Rekomendasi

1. MPR RI dan MK RI sebagai representasi lembaga negara yang didorong untuk segera merealisasikan:
 - Terwujudnya lembaga khusus dan independen yang berwenang sebagai pembina, pengembang, dan pembudaya nilai-nilai Pancasila.
 - Terwujudnya payung hukum sebagai dasar strategi pelembagaan dan pembudayaan Pancasila.
2. Pemerintah dan masyarakat wajib segera mewujudkan pusat-pusat pendidikan dan pembudayaan Pancasila secara mandiri, kreatif, dan dinamis.

Peserta dan Pembicara

Kongres Pancasila IV diikuti sekitar 400 peserta dari berbagai kalangan. Menjadi pembicara utama adalah Ketua MK Prof. Dr Mahfud MD, SH sementara narasumber lain adalah Sultan HB X, Prof. Dr Syafii Ma'arif, Drs H Lukman Hakim Syaifuddin, Prof. Dr Sri Edi Swasono, dan Dr (HC) Siswono Yudohusodo.

Kongres Pancasila V

Tema

Strategi Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menguatkan Semangat Keindonesiaan.

Tempat & Tanggal

Palembang, 31 Mei–1 Juni 2013.

Tokoh/Penyelenggara

MPR RI

PSP UGM

Universitas Sriwijaya.

Rumusan
Kongres Pancasila V
Yogyakarta, 31 Mei–1 Juni 2013

Setelah mendengarkan pidato pembukaan Ketua Panitia, Rektor Universitas Gajah Mada, dan pidato kunci perwakilan MPR RI, serta makalah-makalah yang diutarakan oleh narasumber dan penyaji makalah, juga rapat komisi beserta tiap diskusi, disusunlah rumusan sebagai berikut:

Berbagai kerancuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terjadi pada bangsa Indonesia dewasa ini sungguh memprihatinkan dan menyadarkan banyak pihak bahwa apa yang terjadi sesungguhnya sudah sangat jauh dari apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini.

Penyebab paling mendasar adalah ketidakhadiran nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Strategi pembudayaan Pancasila diarahkan untuk melaksanakan amanat pembukaan UUD 1945, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, (ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut serta memelihara perdamaian dunia yang adil dan beradab.

Keempat aspek tersebut terintegrasi dalam satu kesatuan yang utuh. Pembudayaan Pancasila oleh penyelenggara negara melalui empat pilar kebangsaan yang dikonsepsikan oleh MPR disadari masih menimbulkan kontroversi, sehingga perlu untuk dikoreksi. Berbagai strategi pembudayaan Pancasila dapat ditempuh melalui jalur pendidikan, kebudayaan, sosial, politik, ekonomi, hukum, dan berbagai bidang lainnya. Strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui ranah pendidikan dan kebudayaan dianggap paling taktis. Namun hal ini hanya dapat dilakukan jika terdapat pemahaman yang benar dan utuh terhadap Pancasila.

Strategi pembudayaan nilai Pancasila melalui ranah sosial politik dirasakan sangat berat, dikarenakan kondisi Indonesia saat ini melebihi dugaan semula para ahli. Sebab, Indonesia telah memasuki krisis multidimensional, yang bukan sembarang krisis yang bisa dihadapi secara tambal sulam. Akan tetapi, krisis

ini telah begitu luas dari segi cakupan dan dalam penetrasi, menyerupai situasi zaman peralihan. Untuk memulihkannya, kita memerlukan lebih dari sekadar pendekatan politik seperti biasa, saat ini kita memerlukan satu visi politik baru berdasar nilai Pancasila. Krisis nasional ini berakar jauh pada penyakit spirit dan moral bangsa. Suatu usaha penyembuhan nasional perlu dilakukan dengan membawa nilai-nilai spiritual dan moral Pancasila ke dalam semua aspek kehidupan publik.

Khusus untuk menciptakan negara yang baik, penyelenggara negara dan warga negara perlu memahami dan menjalankan spirit dan moral politik Pancasila sesuai dengan nilai-nilai dasar yang disepakati sebagai titik temu dan pandangan yang bersangkutan. Pembudayaan Pancasila dalam situasi kehidupan politik kita seperti sekarang ini berhadapan dengan liberalisme, anti-gotong royong, politik dinasti, dan demokrasi biaya tinggi. Maka, diperlukan revitalisasi Pancasila dalam pembudayaan nilai Pancasila di lembaga-lembaga negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Strategi pembudayaan nilai Pancasila dalam ranah hukum dirasa sangat sulit apabila tidak disertai revolusi hukum. Revolusi hukum ini akan dapat direalisasikan dengan memahami konsep hukum revolusi. Hukum revolusi bila diaktualisasikan dapat dipilih sebagai salah satu strategi pembudayaan Pancasila dalam meningkatkan semangat keindonesiaan. Caranya: (i) menempatkan faktor manusia lebih penting dan dominan daripada teks-teks perundang-undangan; (ii) mengkonsepkan hukum sebagai perilaku; (iii) melakukan mobilisasi hukum meliputi pembuatan hukum baru, pembatalan hukum yang cacat ideologis, ataupun pendayagunaan hukum adat, hukum alam, hukum agama, kearifan lokal secara kontekstual sehingga strategi pembudayaan Pancasila menjadi bervariasi dan progresif. Hukum revolusi, kecuali garis besar romantika, dinamika, dan dialektika, pada pokok-pokoknya ialah (i) revolusi hukum harus dimulai dengan identifikasi atas hukum-hukum yang cacat ideologis; (ii) revolusi hukum memihak kepada rakyat dengan menekankan kepada keadilan sosial; (iii) revolusi hukum merupakan simfoni dekonstruksi dan rekonstruksi yang berjalan dalam keteraturan dan kedamaian sebagai gerakan nasional; (iv) revolusi hukum mempunyai pentahapan; (v) revolusi hukum harus mempunyai program yang

jelas dan tepat; (vi) revolusi hukum harus mempunyai soko guru dan pemimpin yang tepat, yang punya pandangan jauh ke depan, yang konsekuen, yang sanggup melaksanakan tugas-tugas revolusi sampai pada akhir; dan pun (vii) revolusi juga harus punya kader-kader yang memiliki pemahaman pengertian yang tepat dan semangat tinggi.

Strategi pembudayaan Pancasila dalam ranah ekonomi harus dikembalikan pada jiwa UUD 1945 Pasal 33 sebelum amandemen, yang lebih mencerminkan jiwa kegotongroyongan dalam bidang ekonomi. Ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh sebagai daulat rakyat bukan daulat pasar.

Untuk strategi pembudayaan nilai Pancasila dalam kehidupan keagamaan diperlukan semangat gotong royong intra dan antarpemeluk agama sebagai penguatan atas berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi persatuan, mufakat, dan semangat menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rekomendasi

1. Perlu segera dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar operasional pelaksanaan pendidikan Pancasila pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
2. Khusus untuk pendidikan tinggi, sesudah dikeluarkan UU PT No. 12 Tahun 2012 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu segera diterbitkan peraturan perundangan yang berisi rambu-rambu perkuliahan Pancasila.
3. Perlu disusun program aksi untuk melaksanakan revolusi hukum Indonesia.
4. Pemimpin negara wajib berperan sebagai advokator Pancasila.
5. Untuk memasyarakatkan nilai Pancasila, peserta kongres setuju membentuk Masyarakat Studi Pancasila.

Yogyakarta, 1 Juni 2013

Ketua Tim Perumus

Prof.Dr dr Sutaryo, SpA(K)

Peserta

Kongres Pancasila V dihadiri oleh sekitar 500 peserta yang terdiri dari akademikus, praktisi hukum, guru Pendidikan Kewarganegaraan, perwakilan instansi pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat dari seluruh Indonesia.

Kongres Pancasila VI

Tema

Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan, dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa.

Tempat & Tanggal

Ambon, 31 Mei–1 Juni 2014.

Tokoh/ Penyelenggara

PSP UGM

Universitas Pattimura.

Hasil

Deklarasi

Kongres Pancasila VI

Bahwa sebagai negara bangsa persoalan pemantapan kedaulatan terkait erat dengan upaya memelihara rasa kebangsaan, yang berintikan tidak saja rasa senasib dan sepenanggungan, tetapi juga rasa keadilan dalam kesetaraan hidup berbangsa maupun bernegara, mengacu pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara yang harus berakar pada budi dan etos bangsa dalam kosmologi Nusantara.

Bahwa kebudayaan dan pelebagaan Pancasila dalam memperkokoh kedaulatan bangsa dengan demikian tidak saja terkait dengan pendidikan nilai dan perilaku dari segenap warga bangsa, tetapi juga terkait dengan penyelenggaraan negara dan pembangunan yang perlu dilihat secara utuh dalam konteks kebudayaan dan kewilayahan Nusantara demi menjamin terpeliharanya rasa kebangsaan tersebut.

Bahwa sesuai karakteristik kepulauan, terdapat berbagai kearifan lokal yang perlu dihormati dan dihidupkan dalam ekspansi kesadaran kebangsaan yang luas; juga perlu disadari realitas ketimpangan kewilayahan, yang diindikasikan oleh ketimpangan penyebaran penduduk dan ketimpangan pembangunan antarpulau yang terus berlangsung, yang semua membutuhkan pendekatan yang khas serta sinergis.

Atas dasar pemikiran di atas, peserta Kongres Pancasila VI mendeklarasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paradigma kebudayaan dan pelebagaan Pancasila perlu didekati tidak saja dari atas-bawah, tetapi terutama berbasis pada pengakuan lokalitas masyarakat Nusantara dalam kebhinnekaannya yang tercermin dalam cara berpikir, cara merasa, dan kearifannya sebagai modal sosial dan budaya yang patut dihormati dan dikembangkan dalam derap masing-masing secara wajar.
2. Terhadap kesenjangan pembangunan wilayah, penyelenggara negara dan pemerintah harus menempuh kebijakan yang tegas, nyata, dan terukur bagi penyebaran pusat-pusat keunggulan nasional secara lebih luas sesuai potensi dan juga keterbatasan kewilayahan Nusantara, sehingga kehadiran negara dan keadilan penyelenggaraan negara sungguh-sungguh nyata dirasakan pula oleh rakyat secara luas.
3. Berhadapan dengan realitas ketimpangan penyebaran penduduk, khususnya pemilih, adalah sudah waktunya pula diikhtiarkan suatu pola penyelenggaraan pemilihan umum yang menjamin prinsip kesetaraan berdemokrasi antarwilayah melalui solusi kebangsaan yang cerdas dan elegan dalam kerangka implementasi Pancasila

yang menjamin keadilan politik sebagai prasyarat keadilan sosial yang dikehendaki para pendiri bangsa.

Ambon, 1 Juni 2014

Atas nama Panitia Kongres Pancasila VI

Kongres Pancasila VII

Tema

Pengelolaan Kawasan Perbatasan dalam Rangka Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila.

Tempat & Tanggal

Yogyakarta, 31 Mei–1 Juni 2015.

Tokoh/Penyelenggara

PSP UGM.

Hasil

Belum berhasil ditemukan naskah deklarasi Kongres Pancasila VII. Namun, prosiding kongres berisi kumpulan makalah sudah diterbitkan Tim PSP UGM dengan judul *Membangun Kedaulatan Bangsa berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal* pada Agustus 2015.

Peserta dan Pelaksanaan

Kongres Pancasila VII semula hendak dilaksanakan di Balikpapan, tetapi karena terjadi kendala teknis, kongres dipindah tempat di Yogyakarta. Peserta kongres diperkirakan 1.000 orang yang terdiri dari akademikus, guru, dosen, perwakilan instansi pemerintah, tokoh LSM, dan lain-lain.

Kongres Pancasila VIII

Tema

Re-aktualisasi Tri-Sakti dalam Mewujudkan Bangsa Indonesia yang Berdaulat, Adil, dan Makmur dengan Berdasar pada Nilai-nilai Pancasila.

Tempat & Tanggal

Yogyakarta, 30 Mei–1 Juni 2016.

Tokoh/Penyelenggara

PSP UGM.

Hasil

Dokumen hasil kongres ini belum berhasil dilacak.

Penjabaran Tema

Tema Kongres Pancasila VIII dijabarkan ke dalam tiga subtema: [1]. Kedaulatan Politik: penguatan ideologi Pancasila dalam ranah penyelenggaraan negara dan lingkungan masyarakat (mencakup pembahasan dari perspektif filsafat, hukum, politik, dan sosial-budaya). [2]. Kedaulatan Ekonomi: penguatan kebijakan ekonomi dalam menghadapi MEA dan pemberdayaan ekonomi kreatif di masyarakat (mencakup pembahasan dari perspektif kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, kebijakan pengelolaan sumber daya alam, kebijakan pengelolaan keuangan, kebijakan pengelolaan infrastruktur, kebijakan pengelolaan ekonomi). [3]. Kepribadian dalam Kebudayaan dan Pendidikan: penguatan aspek kepribadian (karakter yang berbudaya) dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (mencakup pembahasan dari perspektif pendidikan, kebudayaan, kearifan lokal).

Kongres Pancasila IX

Tema

Pancasila Jiwa Bangsa: Dinamika, Tantangan, dan Aktualisasi di Indonesia.

Tempat & Tanggal

Yogyakarta, 21–23 Juli 2013.

Tokoh/Penyelenggara

PSP UGM.

Hasil

Dua kesimpulan sekaligus rekomendasi kongres yang penting untuk digarisbawahi ialah [1] perlu dilacak sejarah radikalisme agama di Indonesia dan [2] perlu disusun suatu indikator keberhasilan pembinaan ideologi Pancasila.

Konteks dan Pelaksanaan

Kongres Pancasila IX dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Gedung Senat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Sabtu, 22 Juli 2017. Acara pembukaan ini juga dihadiri Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sultan Hamengkubuwono X, Rektor Universitas Gadjah Mada Panut Mulyono, dan 400 peserta kongres dan tamu undangan lainnya.

Kongres Pancasila IX menjadi momentum yang begitu istimewa karena 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila berdasar Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016.

Kongres Pancasila X

Tema

Pancasila Ideologi Pemersatu Bangsa dan Dunia.

Tempat & Tanggal

Yogyakarta, 23–24 Agustus 2018.

Tokoh/Penyelenggara

PSP UGM.

UNIVERSITAS GADJAH MADA



Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi,
menyampaikan *keynote speech*
pada pembukaan Kongres Pancasila X
di Yogyakarta, 23 Agustus 2018.
(Dari www.kemlu.go.id)


NILAI PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN KEHIDUPAN BANGSA

sangat tergantung
pada kebudayaan
Pancasila dari
generasi ke
generasi secara
berkesinambungan.

BAB

03


Kongres Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Komunitas Adat dan Tradisi



Sebelum keluar TAP MPR No II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan TAP MPR No IV Tahun 1978 tentang GBHN—yang mengatur tentang agama dan kepercayaan, bidang ini sering disebut kebatinan. Bidang ini mulai diperbincangkan dalam kongres sejak Kongres Kebudayaan Jawa pertama yang diselenggarakan pada 1918 di Solo (Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling). Kebatinan juga dibicarakan pada Kongres Kebudayaan 1948. Di luar kedua kongres tersebut, sangat mungkin sebelumnya sudah banyak forum yang memperbincangkan masalah aliran kebatinan/kepercayaan ini.

Sebagaimana halnya unsur kebudayaan yang lain, aliran kebatinan juga giat mencari format untuk menentukan garis konsep, kebijakan, dan strategi pelestariannya. Bidang ini giat menghimpun pendapat melalui forum sarasehan, dialog, seminar, musyawarah, hingga kongres demi merumuskan formula yang tepat dalam menata kehidupannya di tengah-tengah bangsa yang plural dan multikultural.

Upaya pelestarian itu ada yang bersifat eksternal (semisal diprakarsai oleh pemerintah—entah itu lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif—dan institusi lain sebagai mitra) dan ada pula yang bersifat internal (untuk menata konsep kehidupan dalam berkepercayaan dan menyamakan persepsi karena berbeda aliran). Perjuangan yang panjang itu telah melahirkan sejumlah kebijakan baik yang bertujuan melindungi dan mengembangkan keberadaan kepercayaan, adat, dan tradisi maupun dalam mendudukan posisinya di tengah masyarakat yang plural.



Sekalipun diberi ruang dalam dalam KK—misalnya dr Radjiman Wedyodiningrat bersama D. Van Hinloopen Labberton yang mengulas tentang wayang yang sarat filsafat, etika, moral, dan kebatinan dalam Kongres Kebudayaan Jawa 1918 serta Ki Ageng Soerjomentaram, dr Radjiman Wedyodiningrat, dan Ki Mangoensoedarso yang memaparkan prasaran berjudul “Kebatinan sebagai Alat dalam Pembangunan Negara” dalam KK 1948—dirasakan bahwa forum itu belum cukup memuaskan bagi komunitas kebatinan yang jumlahnya cukup banyak. Maka, komunitas ini menyepakati

untuk menyelenggarakan kongres tersendiri dengan nama Kongres Kebatinan. Adapun Kongres Kebatinan atau yang kemudian bernama Kongres Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Komunitas Adat dan Tradisi yang pernah diselenggarakan adalah sebagai berikut.

Kongres Kebatinan I

Tema/Tujuan

Membentuk organisasi bersama.

Tempat & Tanggal

Semarang, 1955.

Tokoh/Penyelenggara

Mr Wongsonegoro.

Peserta dan Pelaksanaan

Tujuh tahun setelah masalah kebatinan dibahas dalam KK 1948 di Magelang, sejumlah tokoh kebatinan—disebutkan sekitar 2.000 orang yang terkumpul dalam 100 organisasi—berkumpul di Semarang untuk melaksanakan Kongres Kebatinan, yang merupakan Kongres Kebatinan I. Melalui kongres ini, pada 1955 resmi berdiri sebuah wadah para penganut kebatinan yang diberi nama Badan Kongres Kebatinan Indonesia, disingkat BKKI. Lembaga ini memilih semboyan “Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe, Memayu Hayuning Bawono”, yang berarti “mengutamakan kerja tanpa memburu imbalan, bekerja keras berlandas hati suci nan bersih demi keselamatan umat manusia dan dunia”. Yang ditunjuk sebagai ketua BKKI pertama adalah Mr Wongsonegoro.

Kongres Kebatinan II

Tema/Tujuan

Belum diketahui.

Tempat & Tanggal

Solo, 1956.

Tokoh/Penyelenggara

Badan Kongres Kebatinan Indonesia/Mr Wongsonegoro.

Pokok Perkara

Kongres ini menegaskan kembali arti kebatinan, yang merupakan sumber asas dan sila Ketuhanan Yang maha Esa untuk mencapai budi pekerti luhur. Semua itu demi kesempurnaan hidup manusia. Dalam kongres ini Wongsonegoro menegaskan, “[G]erakan kebatinan bukanlah merupakan agama baru yang akan mendesak agama-agama yang sudah ada, akan tetapi kebatinan bahkan memperdalam atau *sublimeren* agama-agama yang sudah ada.”

Kongres Kebatinan III

Tema/Tujuan

Belum diketahui.

Tempat & Tanggal

Jakarta, 1958.

Tokoh/Penyelenggara

Belum diketahui.

Pokok Perkara dan Pelaksanaan

Kongres Kebatinan III sangat istimewa karena dihadiri oleh Presiden Soekarno, yang juga memberikan kata sambutan. Selama empat puluh menit Presiden

berpidato membentangkan perihal eksistensi kebatinan. Bung Karno antara lain menyatakan menyambut positif Kongres Kebatinan karena “kebatinan menggunakan sumber azas Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup dan ‘kebatinan’ bukan klenik”.

Kongres Kebatinan IV

Tema/Tujuan

Tidak berbeda antara agama dan aliran kebatinan.

Tempat & Tanggal

Malang, 1960.

Tokoh/Penyelenggara

Belum diketahui.

Pokok Perkara

Kongres Kebatinan IV antara lain menelorkan pernyataan bahwa tidak ada beda antara prinsip agama dan kebatinan; kebatinan justru serupa dengan agama.

Kongres Kebatinan V

Tema/Tujuan

Menegaskan bahwa tidak berbeda antara agama dan aliran kebatinan.

Tempat & Tanggal

Surakarta, 1963.

Tokoh/Penyelenggara

Belum diketahui.

Fakta, Cerita, dan Opini

Kongres Kebatinan V kemungkinan merupakan kongres kebatinan yang terakhir sebelum berganti nama menjadi Kongres Kepercayaan terhadap Tuhan YME serta Komunitas Adat dan Tradisi. Setelah diselenggarakan Kongres Kebatinan V di Surakarta pada 1963, direncanakan Kongres Kebatinan VI pada 1965 tetapi batal karena terjadi peristiwa G30S. Lalu, tidak diselenggarakan lagi kongres serupa.

Namun, buku *Kebatinan dan Injil* karya Dr Harun Hadiwijono (2006:1) menyebutkan bahwa pada 1968 di Ponorogo diselenggarakan Kongres BKKI V. Pertanyaannya: [1]. Apakah kongres ini membahas masalah kebatinan ataukah pertemuan Badan Kongres Kebatinan Indonesia sebagai organisasi massa; sebab, bila merupakan pertemuan BKKI sebagai organisasi massa, tentu tidak sesuai dengan pengertian kongres yang ingin dipaparkan buku ini. [2]. Apakah data itu valid atau sebenarnya merupakan rencana sebagaimana kongres yang direncanakan bakal diselenggarakan pada 1965; sebab, Dr Harun mengutip karya Tjahaja Widjajakusuma yang berjudul *Buku Windu BKKI*—lihat halaman 3, 5, dan 96—yang terbit pada 1963, lima tahun sebelum peristiwa berlangsung.

Sebelum beralih mengulas bentuk baru Kongres Kebatinan, beberapa poin bisa digarisbawahi dari serangkaian yang telah terselenggara terkait bagaimana mendudukan keberadaan aliran kepercayaan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Republik Indonesia. Beberapa poin pemikiran itu adalah sebagai berikut: [1]. Kepercayaan adalah bagian dari kebudayaan yang kemudian dikenal dengan sebutan budaya spiritual; [2]. Aliran kepercayaan bukan agama baru dan tidak berbeda prinsip dengan agama; [3]. Aliran kepercayaan bukan klenik; [4]. Aliran kepercayaan menggunakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan [5]. Aliran kepercayaan mempunyai peran dalam membangun bangsa.

Kelima rumusan itu hingga kini dijadikan prinsip kunci—terutama pihak eksternal—dalam menyikapi dan melestarikan keberadaan aliran kepercayaan. Di sisi lain, meski kelima pandangan ini telah dijadikan prinsip kunci, para penghayat kepercayaan serta komunitas adat dan tradisi secara terus-menerus tetap melakukan upaya menemukan formula baru, karena kebudayaan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Kemunduran dan Kebangkitan Pasca-Kongres Kebatinan V

Para penghayat aliran kepercayaan termasuk salah satu yang terdampak negatif oleh peristiwa G30S. Sentimen antikomunis yang berkembang serta asosiasi yang lalu timbul bahwa penghayat aliran kepercayaan identik dengan pendukung PKI menempatkan mereka di posisi kritis.

Konon, PKI yang masih hidup berusaha untuk bangkit kembali. Sebagian membangun apa yang disebut “Gerakan PKI Malam”; salah satunya dipimpin oleh Mbah Suro alias Mulyono alias Surodihardjo. Pusat gerakan ini berada di wilayah terpencil di tepi Bengawan Solo, tepatnya di Desa Nginggil, Kecamatan Menden di antara Kabupaten Blora dan Ngawi. Gerakan PKI Malam ini “dibungkus” dalam bentuk perdukunan atau perguruan yang berbau mistik dan klenik. Pada 5 Maret 1967, padepokan ini dihancurkan oleh ABRI karena diduga merupakan perkumpulan PKI dan jalan damai agar perkumpulan terlarang ini bubar tidak mencapai titik temu (*Komunis di Indonesia Jilid IV: Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-sisanya* (1965–1981), Pusat Sejarah TNI, 2009:75–77).

Kisah dramatis Mbah Suro ini berdampak negatif terhadap para penghayat kepercayaan/kebatinan. Nama aliran kepercayaan ikut tercoreng; kepercayaan masyarakat terhadap aliran kepercayaan surut. Dengan kondisi seperti itu, aliran kepercayaan “menahan diri” untuk tidak banyak tampil di permukaan, sambil berupaya mengembalikan nama baiknya.

Sepuluh tahun kemudian, setelah melalui perjalanan yang panjang, berkelok, dan berliku usaha para pembela keberadaan kepercayaan membuahkan hasil. Lahir TAP MPR No II Tahun 1978 dan TAP MPR No IV Tahun 1978 yang mendorong dibentuknya lembaga di lingkungan pemerintahan dengan nama Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dasar penempatan lembaga ini di lingkungan Direktorat Jenderal kebudayaan ialah karena aliran kepercayaan merupakan salah satu unsur kebudayaan dengan sebutan “budaya spiritual”. Dengan lahirnya lembaga di pemerintahan untuk mengurus masalah kepercayaan, maka keberadaannya menjadi stabil hingga kini.

Nomenklatur direktorat itu semula adalah Direktorat Pembinaan

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa tugas dan fungsi unit ini lebih dititikberatkan pada segi “pembinaan”, yaitu upaya peningkatan kualitas manusia pendukung Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang selanjutnya disebut “penghayat”. Jadi, tugas pokok unit ini sesuai arahan GBHN adalah: (a) agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru; dan (b) untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kini (sejak 2012) nomenklatur lembaga itu berubah menjadi Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Dengan nomenklatur baru tanpa kata “penghayat” berarti ruang lingkup kegiatan direktorat ini tidak hanya semata-mata membina para penghayat melainkan lebih luas lagi mencakup keberadaan lembaga kepercayaan di masyarakat beserta ajaran dan aktivitasnya. Dengan adanya perubahan ini, eksistensi kepercayaan yang didukung oleh Pasal 28, 29, dan 32 UUD 45 semakin diakui.

Adapun mengenai tambahan kata “dan tradisi” sesungguhnya berasal dari nama direktorat yang lain, yaitu Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Karena diberlakukannya perampingan organisasi, kedua direktorat itu digabung menjadi satu. Sementara itu, di dalam rincian tugas dan fungsinya, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa dan Tradisi juga mengurus keberadaan masyarakat atau komunitas adat. Mengenai hal ini, UNESCO mulai memperhatikan keberadaan komunitas adat sejak sekitar 1950-an dengan sebutan “*indigenous peoples*”.

Di era Reformasi muncul “gerakan” yang mencerminkan suatu kesadaran yang meningkat tentang eksistensi masyarakat adat; terbentuklah suatu forum dengan nama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Forum ini berangsur-angsur berkembang, berkonsolidasi, dan berjejaring sehingga akhirnya mereka sepakat menyelenggarakan kongres dengan nama Kongres Masyarakat Adat Nusantara—disingkat KMAN. Hingga kini telah berlangsung empat kali kongres. Kongres yang pernah diselenggarakan oleh AMAN adalah sebagai berikut: (1) Kongres MAN I Tahun 1999 di Jakarta; (2) Kongres MAN II Tahun 2003 di Lombok; (3) Kongres MAN III Tahun 2008 di Pontianak; (4) Kongres MAN IV Tahun 2012 di Ternate, Maluku Utara.

Selain kongres MAN yang berskala nasional, diadakan pula kongres masyarakat adat tertentu. Paling tidak telah berlangsung tiga kongres, yaitu: (1) Kongres Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah—telah berlangsung dua kali, yaitu pada 2003 dan 2006 di Palangkaraya; (2) Kongres Masyarakat Adat Banda—digelar pada 2010 di Istana Mini, Banda, Kabupaten Maluku Tengah; dan (3) Kongres Masyarakat Adat Osing, Banyuwangi—diselenggarakan pada 2011 di Paseban Desa Wisata Osing, Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

Dari kongres MAN telah dihasilkan sejumlah kebijakan, strategi, rekomendasi, pernyataan, serta tuntutan. Kongres antara lain menyatakan bahwa adat di Nusantara ini sangat majemuk, oleh karena itu tidak ada tempat bagi kebijakan negara yang berlaku seragam. Disimpulkan pula bahwa jauh sebelum negara Indonesia berdiri, masyarakat adat di Nusantara telah terlebih dahulu mampu mengembangkan sistem kehidupan sebagaimana yang diinginkan dan dipahami sendiri dan oleh sebab itu negara harus menghormati kedaulatan masyarakat adat ini.

Selain itu juga telah dicapai sejumlah kesepakatan yang berisi “kewajiban” bagi seluruh MAN, yang memiliki implikasi besar terhadap keutuhan dan ketenangan MAN. Atas dasar rasa kebersamaan senasib sepenanggungan, masyarakat adat senusantara wajib untuk saling bahu-membahu demi terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang layak dan berdaulat. Juga telah dirumuskan kebijakan untuk pelestarian MAN. Misalnya, melalui tuntutan bahwa warga masyarakat adat juga berhak atas kehidupan yang layak dan pantas menurut nilai-nilai sosial yang berlaku. Setiap masyarakat adat memiliki budaya yang mencakup berbagai aspek yang antara lain meliputi seni, bahasa, sejarah, adat istiadat, sistem nilai, sistem mata pencaharian, sistem kepercayaan, dll. Dalam hidup berkebudayaan, masyarakat memiliki aneka ragam kearifan yang sering disebut sebagai “kearifan lokal” atau “*local wisdom*” atau “*local genius*”.

Pada 2012, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan kongres untuk membahas kepercayaan sekaligus persoalan masyarakat adat dan tradisi. Judulnya, “Kongres Nasional Kepercayaan terhadap

Kongres Kepercayaan terhadap Tuhan YME serta Komunitas Adat dan Tradisi

Keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara yuridis formal telah diakui oleh negara sejak ditetapkannya UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa menyadari bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu ada dan berkembang di wilayah Nusantara dan untuk perlu diatur keberadaannya dalam konstitusi. Hingga kini jumlah penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sekitar 12 juta orang dan memiliki 239 organisasi tingkat pusat serta 1.031 organisasi tingkat cabang yang tersebar di berbagai daerah.

Meski secara yuridis keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi/KKAT sudah jelas dan cukup kuat, tantangan KKAT ke depan bukan semakin ringan tetapi semakin kompleks. Seperti yang dicatat dalam buku panduan Panitia Kongres Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Komunitas Adat dan Tradisi (KKAT), keberadaan mereka di era reformasi dan era yang akan datang selayaknya dapat menunjukkan kiprah dan kontribusi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, peluang dan kesempatan untuk berekspresi itu belum terbuka karena: (1) pemahaman keliru dari sebagian besar masyarakat bangsa maupun penyelenggara negara tentang KKAT; (2) kurangnya percaya diri masyarakat KKAT akibat perlakuan diskriminatif dan pencitraan buruk yang diterima selama ini; (3) masih lemahnya perlindungan hukum dan pengayoman dari negara; (4) lemahnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah yang tampak setengah hati dalam melestarikan dan memajukan kehidupan mereka, sehingga masyarakat KKAT semakin tergerus dan tidak berdaya.

Dari empat masalah tersebut dapat dipilah bahwa dua masalah berkenaan dengan intern KKAT dan dua masalah lagi berkenaan dengan pihak luar—dalam hal ini negara dan perangkatnya. Sesuai dengan berbagai paradigma yang berkembang dewasa ini, maka kebijakan dan strategi yang akan

dikembangkan perlu memperhatikan perubahan-perubahan itu. Isu yang paling banyak dikhawatirkan terkait budaya tradisi adalah masalah globalisme yang sekarang sedang marak. Selain itu, peralihan sistem pemerintahan sentralistik ke desentralistik juga membawa pengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan. Demikian juga dengan isu demokrasi; bahwa keterbukaan dan kebebasan sangat berpengaruh terhadap kelestarian kebudayaan bangsa termasuk KKAT.

Lembaga baru yang dibentuk setelah lahirnya TAP MPR No II Tahun 1978 dan TAP MPR No IV Tahun 1978 hanya sebatas menyelenggarakan berbagai pertemuan dalam bentuk sarasehan, dilalog, dan seminar saja. Antara lain pernah diselenggarakan Sarasehan Nasional Kepercayaan (1981), Dialog Budaya Spritual (2000), dan Seminar Kepercayaan Masyarakat (2005)—yang terakhir ini diselenggarakan di Yogyakarta dengan tema yang provokatif: “Masa Depan Kepercayaan: Dilestarikan atau Ditinggalkan”.

Dari serangkaian perbincangan tentang aliran kepercayaan, perbincangan dalam forum penentuan UUD 1945 pastilah yang paling penting. Perdebatan para anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ketika membahas rancangan tentang agama dan kepercayaan sangat serius seperti dapat dibaca pada Risalah UUD 1945. Demikian pula ketika dilaksanakan pembahasan amendemen UUD 1945 pada masa reformasi.

Setelah Kongres Kebatinan V 1963 hingga 2012, yang berarti hampir lima puluh tahun, bidang kepercayaan tidak pernah diperbincangkan dalam forum kongres. Uraian secara singkat mengenai penyelenggaraan Kongres Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa serta Komunitas Adat dan Tradisi (Kongres KKAT) adalah sebagai berikut.

Maksud dan Tujuan

Kongres ini dimaksudkan untuk menampung pemikiran-pemikiran dan gagasan yang berharga dari para pelaku, pakar, dan pemerhati kepercayaan terhadap Tuhan YME serta komunitas adat dan tradisi. Tujuannya adalah mendapatkan bahan masukan untuk menyusun konsep dasar (*grand strategy*) pengembangan

kepercayaan serta komunitas adat dan tradisi.

Tema

Revitalisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Adat, dan Tradisi bagi Pembangunan Karakter dan Jati Diri Bangsa.

Tema utama itu dijabarkan ke dalam empat subtema: (1) Konsep Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Komunitas Adat dan Tradisi, yang dibahas di Komisi I; (2) Advokasi dan Pemberdayaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Komunitas Adat dan Tradisi, yang dibahas di Komisi II; (3) Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Komunitas Adat dan Tradisi, yang dibahas di Komisi III; dan (4) Kebijakan dan Strategi Pelestarian Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Komunitas Adat dan Tradisi, yang dibahas di Komisi IV.

Tempat & Tanggal

Surabaya, 25–28 November 2012.

Tokoh/Penyelenggara

Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME & Tradisi.

Hasil

Rumusan

**Kongres Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
serta Komunitas Adat dan Tradisi
Tahun 2012**

Pada 25–28 November 2012 telah dilaksanakan Kongres Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Komunitas Adat dan Tradisi, yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kongres dibuka oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Metode kegiatan dilakukan dengan penyajian materi oleh narasumber, tanya jawab interaktif, dan peserta dibagi ke dalam 4 (empat) komisi secara representatif, yaitu Komisi I tentang Redefinisi Konsep Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Komisi II tentang Advokasi dan Pemberdayaan; Komisi III tentang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan Komisi IV tentang Kebijakan dan Strategi Implementasi. Selanjutnya, hasil sidang komisi itu didiskusikan di Tim Perumus yang merupakan perwakilan dari organisasi penghayat serta komunitas adat dan tradisi pada sidang pleno kongres untuk menyempurnakan rumusan hasil kongres.

Peserta kongres sebanyak 750 orang terdiri atas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi yang berasal dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia.

Berdasarkan laporan Ketua Panitia, sambutan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pidato Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, paparan narasumber, diskusi interaktif, sidang Tim Perumus, dan sidang pleno, maka dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

Komisi I

1. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sistem penghayatan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang didasarkan pada sistem kesadaran yang bersumber pada nilai spiritual warisan leluhur.
2. Pendidikan budi pekerti merupakan suatu keharusan untuk membentuk karakter budi luhur dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai budaya spiritual yang bersumber pada kearifan lokal.

Rekomendasi

1. Negara menjamin kesetaraan dalam sistem pengelolaan dan pelayanan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi.
2. Mengusulkan pembentukan Kementerian Kebudayaan.

3. Pentingnya pemenuhan hak-hak sipil penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi dalam konstitusi.
4. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban membangkitkan kembali Pancasila menjadi jiwa dan karakter bangsa.
5. Pemerintah berkewajiban untuk menghidupkan, melestarikan, dan menumbuhkembangkan nilai-nilai spiritual Ketuhanan Yang Maha Esa, warisan aktivitas budaya dan warisan budaya hidup (masyarakat adat) yang ada di seluruh wilayah Indonesia agar generasi penerus mengenal dan mencintai budaya bangsanya.
6. Pemerintah berkewajiban menggali nilai-nilai kearifan lokal/ budaya bangsa dalam menjaga dan melestarikan hidup.

Komisi II

1. Pentingnya membentuk Lembaga Advokasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME/Agama Leluhur serta Komunitas Adat dan Tradisi untuk konsultasi, penyuluhan, dan bantuan hukum sesuai perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Pentingnya mengawal proses pembahasan dan pengesahan RUU (Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat) dengan memperhatikan usulan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang sudah diserahkan ke DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg).
3. Pentingnya mendata ulang jumlah penghayat kepercayaan/agama leluhur serta komunitas adat dan tradisi.
4. Pentingnya menyiapkan kurikulum pendidikan budi pekerti yang memuat ajaran spiritual yang berbasis pada kearifan lokal dan kepercayaan leluhur untuk diajarkan di lembaga pendidikan.
5. Meminta kepada pemerintah untuk segera mengimplementasikan pemenuhan hak-hak konstitusional bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi dalam sistem hukum NKRI.

6. Merekomendasikan agar HPK, BKOK, organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME serta komunitas/masyarakat adat dan tradisi menjadi penyalur aspirasi ke tingkat pemerintah pusat.
7. Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar memuat dalam kurikulum pendidikan bidang studi agama leluhur, kepercayaan terhadap Tuhan YME, dan tradisi bagi anak didik masyarakat adat, penghayat kepercayaan dan tradisi.
8. Agar seluruh sumber daya kepercayaan terhadap Tuhan YME serta komunitas adat dan tradisi dijadikan sebagai bagian yang strategis dalam rangka pembangunan kebudayaan, pembangunan karakter dan jati diri bangsa.
9. Agar urusan kebudayaan dan kepercayaan dipisahkan dari Kemeterian Pendidikan.
10. Perlu dilakukan penguatan kapasitas, revitalisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi.
11. Mengusulkan hari libur nasional kepercayaan terhadap Tuhan YME.
12. Pembuatan peraturan dan kebijakan baik di tingkat pusat maupun provinsi/daerah harus melibatkan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi.
13. Pemerintah menganggarkan dana melalui APBN dan APBD untuk seluruh kegiatan kepercayaan terhadap Tuhan YME serta komunitas adat dan tradisi.
14. Perlu mengembangkan jejaring sosial antar-para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan/agama leluhur yang menyeluruh mulai dari tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten, dan kecamatan.

Rekomendasi

1. Mendorong agar terus-menerus dilakukan ruang dialog antara penghayat kepercayaan, komunitas adat dan tradisi, dan agama dalam masyarakat, baik yang difasilitasi negara maupun kelompok-

kelompok dan atau organisasi agar mencari masukan dan formula melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan norma, nilai-nilai, prinsip, dan kearifan para penghayat, komunitas adat dan tradisi. Dalam hal ini terkait kepercayaan terhadap Tuhan YME serta komunitas adat dan tradisi sebagai bagian dari perwujudan kehidupan berbangsa Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa, komunikasi vertikal dan horizontal dilakukan secara damai dan saling menghormati, untuk menemukan hakikat dan prinsip yang sama, dalam rangka menempatkan para penghayat kepercayaan/agama leluhur bukan dalam posisi yang berhadapan, bertentangan, atau berlawanan serta menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

2. Mendorong terciptanya pemahaman umum untuk menempatkan kepercayaan/agama leluhur dalam posisi yang sejajar dan setara, mendesak agar negara memperlakukan kepercayaan/agama leluhur setara dengan enam agama lainnya, sehingga kami dapat menjalankan kepercayaan/agama leluhur kami dengan kepastian. Bahwa masing-masing memiliki hak ruang dan kesempatan yang sama untuk memberi peran bagi pembangunan kebudayaan Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa.
3. Mendorong kehidupan warga negara yang aman dan sejahtera dalam identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka dan berketuhanan Yang Maha Esa. Melalui kongres nasional ini menegaskan tentang pentingnya menghormati dan melestarikan keragaman budaya Nusantara, sehingga setiap bentuk pembangunan harus dilakukan dengan tetap menghargai dan berorientasi pada norma, nilai-nilai, prinsip, dan kearifan para penghayat serta komunitas adat, budaya, dan tradisi.
4. Mendesak pemerintah agar membangun sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang mengakui eksistensi kami sebagai penghayat kepercayaan/agama leluhur, sehingga tradisi kami dapat terpelihara dan tersosialisasikan dengan baik.
5. Mendorong agar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa serta komunitas adat dan tradisi mengajukan *judicial review* atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan di bawahnya agar mengakui, menghormati, dan memelihara kepercayaan/agama leluhur yang kami jalankan.

6. Mendorong agar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME serta komunitas adat dan tradisi untuk melakukan pengawasan dan memasukkan jaminan praktik kepercayaan/agama leluhur dalam RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, termasuk menambahkan pasal-pasal yang berpihak kepada perempuan.
7. Mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia agar segera menghentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan terhadap para penghayat kepercayaan/agama leluhur.

Komisi III

1. Pembentukan wadah tunggal Dewan Kepercayaan yang diberi nama Dewantara.
2. Penghayat dan pemerintah bekerja sama dalam menyusun materi bahan ajar untuk pendidikan budi pekerti untuk anak didik para penghayat.
3. Kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk dihilangkan.
4. Pentingnya pembentukan lembaga advokasi untuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi.
5. Mengusulkan Mr Wongsonegoro sebagai Bapak Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Pahlawan Nasional.
6. Perlunya dibentuk lembaga pendidikan anak usia dini untuk putra-putri penghayat untuk mewariskan nilai-nilai spiritual sejak dini.
7. Pentingnya mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang perizinan tempat ibadah/sanggar dan tempat pemakaman.

Komisi IV

Pendidikan budi pekerti yang hendak dimasukkan/diajarkan dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Adanya peraturan menteri yang mengatur tentang pendidikan kepercayaan di sekolah bagi peserta didik dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi sesuai dengan keyakinan peserta didik.
2. Diperlukan revisi/amendemen UU Sistem Pendidikan Nasional dan/atau perppu sesuai dengan tuntutan kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi.
3. Pendidikan Pancasila diberikan kembali secara mendetail sesuai jenjangnya.

A. Hak-Hak Sipil

1. Sosialisasi undang-undang dan/atau peraturan pemerintah tentang eksistensi dan keberadaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi.
2. Pemerintah memberi pembekalan dan pembinaan kepada pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi secara rutin dan berkesinambungan.
3. Jaminan pemenuhan hak-hak sipil bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi.

B. Pencitraan

1. Mengusulkan kepada pemerintah agar ada standardisasi isu di bidang kebudayaan supaya tidak ada tanggapan negatif/stigmatisasi kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi.
2. Mengusulkan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan atas tayangan yang menyudutkan atau melecehkan penghayat

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi.

3. Mengajukan somasi kepada pelaku media yang membuat tayangan yang melecehkan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi.
4. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers Indonesia (DPI) wajib menegur media yang memuat hal-hal yang menyudutkan atau melecehkan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi.
5. Mengusulkan kepada DPR RI agar dibuat undang undang perlindungan terhadap komunitas adat dan tradisi.
6. Mengusulkan kepada pemerintah agar menegaskan kembali ketetapan tahun baru nasional Indonesia pada 1 Suro Tahun Saka.
7. Meningkatkan kerja sama antar-penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi dalam memperingati hari-hari besar nasional.
8. Mengusulkan kepada pemerintah agar memfasilitasi sosialisasi nilai-nilai luhur penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi melalui media cetak maupun elektronik.

C. Kebijakan dan Strategi

1. Terbentuknya Kementerian Kebudayaan.
2. Disetarakannya kedudukan antara penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi dengan agama yang ada sekarang dalam konteks pendidikan.
3. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.
4. Pelaksanaan Kongres Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Komunitas Adat dan Tradisi secara berkala.

5. Menghilangkan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta komunitas adat dan tradisi.

Surabaya, 28 November 2012

Tim Perumus

Seluk Beluk Pelaksanaan

Pembukaan kongres diselenggarakan di The Square Ballroom, ICBC Centre Building, Jl. Basuki Rakhmat No. 16–18, Surabaya. Sedangkan penutupan kongres diselenggarakan di Hotel Bumi Surabaya. Sidang komisi diselenggarakan di tiga tempat: (1) Hotel Bumi Surabaya; (2) Hotel Mercure; dan (3) Hotel Garden Palace Surabaya.

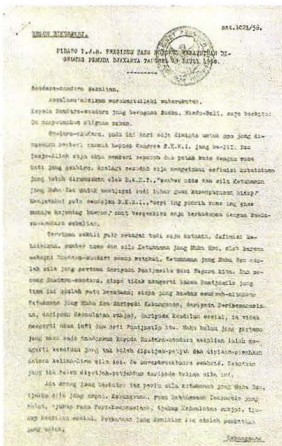
Narasumber yang hadir terdiri atas unsur-unsur: (1) penghayat/organisasi KKAT; (2) akademikus; (3) pemerhati kebudayaan; (4) penggiat kebudayaan, demokrasi, dan HAM; (5) unsur pemerintah. Peserta kongres disepakati sebanyak 750 orang, berasal dari seluruh provinsi dan terdiri atas: (1) unsur organisasi KKAT; (2) unsur akademikus; (3) unsur budayawan; (4) penggiat kebudayaan, demokrasi, dan HAM; (5) unsur pemerintah.

Acara pembukaan diawali dengan sambutan Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs H. Saifullah Yusuf (Gubernur Jawa Timur Dr Sukarwo, SH berhalangan hadir karena sedang berada di Banyuwangi). Ia antara lain menyatakan bahwa komunitas-komunitas kepercayaan, adat, dan tradisi berkumpul untuk menyatukan pikiran, merumuskan gagasan-gagasan yang muaranya satu, yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kepercayaan terhadap Tuhan YME memiliki konsekuensi untuk berbuat amal kebajikan yang direpresentasikan dalam konsep “urip sing nguripi”. Artinya, hidup itu harus dapat menghidupi. Menghidupi sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan saling menghargai dan mencintai sesama makhluk ciptaan Tuhan.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wiendu Nuryanti (mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh yang sedang bertugas ke luar negeri) meminta agar stigma negatif yang disematkan oleh sebagian

masyarakat kepada para penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adat, dan tradisi dapat dihilangkan. Sudah saatnya semua prasangka buruk terhadap komunitas ini dihilangkan dan semua memastikan tidak ada lagi praktik diskriminasi terhadap mereka.

Setelah acara pembukaan kongres oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wiendu Nuryanti, acara dilanjutkan dengan penyampaian pidato kunci oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr Mahfud MD—yang dalam hal ini diwakili Wakil Ketua MK, Prof. Dr Achmad Sodiki, SH—dan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional RI, Prof. Dr Ir Budi Susilo Soepandji, DEA.



Lembar pertama pidato
 Presiden Sukarno pada
 Pembukaan Kongres
 Kebathinan III, 17 Juli 1958
 di Gedung Pemuda, Jakarta.
 (Dari ANRI, Pidato Presiden
 1951-1958, No. 01313.

KRMT. Wongsonegoro,
 penggagas Kongres Kebathinan
 yang berlangsung pertama
 kali pada 19-20 Agustus 1955
 di Semarang. (Dari Koleksi
 Perpustakaan Nasional RI)



Halaman muka terbitan
 berkala bulanan *Suara
 Kebathinan* yang diterbitkan
 Badan Kongres Kebathinan
 Indonesia dengan
 penanggung jawab redaksi
 S.K. Trimurti.

BELUM DIKOREKSI.

S U A R A

nst.1021/58.

KEBATHINAN

Saudara-saudara sekalian,

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.

Kepada Saudara-saudara jang beragama Hindu-Bali, saja berkata:

Om manpatmahum alighnam a

Saudara-saudara, pada tanggal 12 April 1961 untuk apa jang di-
namakan memberi amanat kepada jang ke-III. Dan
Insya-Allah saja akan berkata dengan rasa
hati jang gembira. Apalagi sesudah saja mengetahui definisi kebathinan
jang telah dirumuskan oleh B.K.K.I., "Sumber dan sila Ketuhanan
jang Maha Esa untuk mentjapai budi luhur dan kesempurnaan hidup."
Mengetahui pula sambojan B.K.K.I., "Sesungguhnya rami ing gawe
mamaju kajuwing dawana" amat bergembira sahadap dengan Sauda-
ra-saudara sekalian.

Terdapat sekali pula sebagai tambahan katakan, definisi ke-
bathinan, sumber akan sila Ketuhanan jang Maha Esa, oleh karena
sebagai Saudara-saudara semua ketahu, Ketuhanan jang Maha Esa ada-
lah sila jang pertama daripada Pantjasila dari Negara kita. Dan me-
mang Saudara-saudara jang tidak mengerti bahwa Pantjasila jang
lima ini adalah satu kesatuan; jang jang hendak memisah-misahkan
Ketuhanan jang Maha Esa daripada Ketuhanan, daripada Perikemanusia-
an, daripada Keadilan, daripada Persatuan sosial, ia tidak
mengerti akan inti dari Pantjasila. Kalau jang pertama
jang akan saja maksudkan, ketuhanan jang pertama ialah me-
ngerti kesatuan jang tak boleh dipetjah-petjah dan dipisah-pisahkan

No. 2 Hh. ke II April 1961
jang tak boleh dipetjah-petjahkan daripada kelima sila ini.

Ada orang jang berkata: tak perlu sila Ketuhanan jang Maha Esa,
tjukup sila jang empat. Kebangsaan, rasa kebangsaan Indonesia jang

DEFINISI KEBATHINAN

bulat, tjukup rasa Persatuan sosial, tjukup peraturan rakjat, tjuk-
kup Keadilan sosial. Perkataan jang demikian itu adalah perkataan
Sumber Azas dan Sila Ketuhanan jang Maha Esa

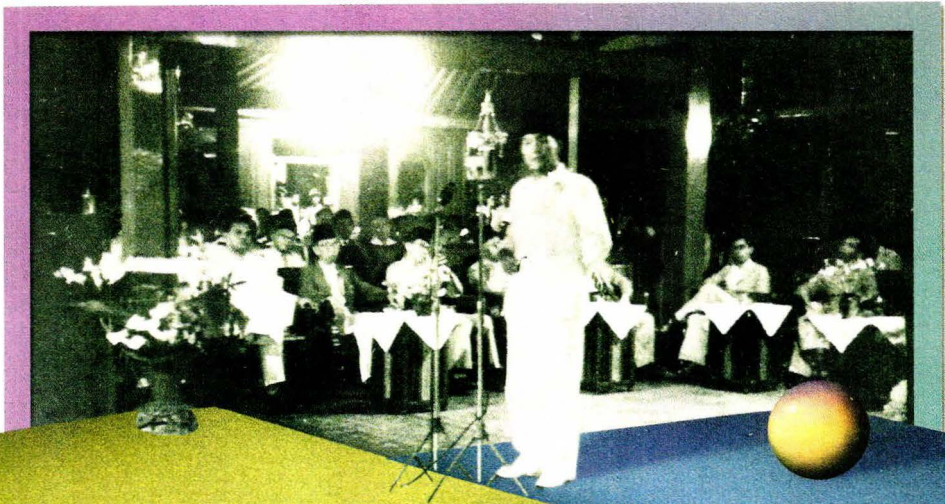
Untuk Mentjapai Budi Luhur Guna Kesempurnaan Hidup!

BAB

04

Kongres

Pendidikan,
Pengajaran,
dan
Kebudayaan



Pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat dekat. Kedekatan ini dapat dilacak dari seluruh perjalanan kongres kebudayaan baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka. Setiap kali diselenggarakan kongres kebudayaan, masalah pendidikan hampir selalu dijadikan perbincangan. Misal, salah satu pokok bahasan dalam KK 1918 adalah tentang kebutuhan untuk mengajarkan sejarah di sekolah-sekolah bumiputra. Kongres-kongres kebudayaan selanjutnya pun masih membahas persoalan pendidikan sekalipun dengan topik yang agak berbeda. Bisa disebut: masalah pendidikan berbasis sejarah Jawa, Sunda, Madura, dan Bali dibahas pada KK 1919; pendidikan seni menjadi salah satu topik pada KK 1921; fungsi bangunan cagar budaya bagi pendidikan didiskusikan pada KK 1924; masalah pelajaran sastra, filsafat, dan budaya Timur untuk perguruan tinggi diperbincangkan pada KK 1929; dan masalah pelajaran kerajinan rakyat mengemuka pada KK 1937 di Bali. Setelah Indonesia merdeka pun masalah pendidikan masih dijadikan pokok bahasan dalam KK. Bahkan, pada KK 1954 pokok bahasan yang dipilih adalah pendidikan kebudayaan.

Namun, sekalipun pendidikan sudah masuk dalam perbincangan kongres kebudayaan, kaum pergerakan terutama para pendidik, cendekiawan, budayawan, dan seniman tetap tergerak untuk menyelenggarakan kongres yang secara khusus membahas pendidikan. Berbagai sumber menyebutkan, sebelum Indonesia merdeka telah berlangsung dua kali kongres pendidikan. Kongres pertama berlangsung pada 1935 dan kedua pada 1937. Setelah Indonesia merdeka, kongres pendidikan berlangsung tahun 1947.

Tiga kongres pendidikan itu misalnya bisa kita lacak dari buku *Sejarah Pendidikan Indonesia* karya Sutedjo Brajanegara (1956). Ia menulis, “[P]ara pemimpin pergerakan kebangsaan telah menyelenggarakan tiga kali Kongres Pendidikan Nasional, tahun 1935, 1937, dan 1947.” Disebutkan juga, kongres itu diselenggarakan dalam rangka mencari sistem pendidikan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang ingin ditemukan adalah suatu sistem pendidikan dan

pengajaran yang khas Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Pencarian ini sesungguhnya telah dirintis oleh Ki Hadjar Dewantara sejak 1922 (*Negara Minus Nurani*, 2009:171).

Mengenai hubungan kebudayaan dan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara sempat mengutarakan penjelasan. Dalam sambutan Kongres Pendidikan Nasional 1947, ia mengatakan: “Untuk menyatakan serta memerdekakan kebudayaan bangsa kita! Itulah [mengapa] kini kita mengadakan Kongres Pendidikan Antar-Indonesia. Besok pagi akan saya jelaskan serta saya buktikan, bahwa pendidikan dan pengajaran itu adalah usaha kebudayaan semata-mata, bahwa perguruan itu ialah taman-persemaian benih-benih kebudayaan bagi suatu bangsa (Ki Hadjar Dewantara, 1977:184–188).”

Gambaran penyelenggaraan kongres pendidikan yang dapat dihimpun adalah sebagai berikut.

Kongres Pendidikan dan Pengajaran

1. Kongres Pendidikan I

Tema/Tujuan

Belum diketahui.

Tempat & Tanggal

Solo, 1935.

Tokoh/Penyelenggara

Belum diketahui.

Pokok Perkara

Kongres Pendidikan Indonesia I diselenggarakan untuk memetakan ranah pendidikan yang meliputi wilayah keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Kaum pergerakan dan para penggerak pendidikan sepakat untuk menempatkan pendidikan sebagai masalah penting untuk dibahas bersama menuju cita-cita Indonesia merdeka. Mencerdaskan kaum bumiputra agar dapat

sejajar dengan bangsa Barat melalui pendidikan kebudayaan juga dibahas oleh para cendekiawan bumiputra dalam Kongres Kebudayaan pada 1918, 1921, 1924, 1926, dan 1929. Lalu diperdalam dan dipertegas lagi melalui Kongres Pendidikan 1935.

2. Kongres Pendidikan II

Tema

Belum diketahui.

Tempat & Tanggal

Belum diketahui, 1937.

Tokoh/Penyelenggara

Belum diketahui.

Pokok Perkara

Beberapa sumber menyebutkan bahwa tujuan Kongres Pendidikan Nasional II adalah membahas hubungan sekolah-sekolah partikelir (swasta) serta masalah terkait kebijakan pemerintah kolonial yang hendak mengurangi jumlah ELS (*europesche lagere school*) atau disebut juga HIS (*hollandsch inlandsche school*). Sekolah dasar 7 tahun ini menggunakan sistem dan metode seperti sekolah di negeri belanda. Di samping itu pemerintah kolonial juga akan mengurangi akses pendidikan tinggi bagi bumiputra serta memperlambat perkembangannya. Pada kongres ini disajikan pameran hasil gambar dan kerajinan tangan anak-anak pribumi.

3. Kongres Pendidikan III

Tema/Tujuan

Meninjau kembali dan menyempurnakan berbagai masalah pendidikan dan pengajaran.

Tempat & Tanggal

Solo, 4–6 Agustus 1947.

Tokoh/Penyelenggara

Ki Hajar Dewantara/Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran.

Konteks dan Peristiwa

Pada 1946, di awal jabatannya sebagai Menteri Pengajaran, Soewandi membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Tugas Panitia ini adalah mengidentifikasi dan menghimpun data yang akan dijadikan bahan penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia setelah menjadi bangsa merdeka.

Selanjutnya, pada 1947 diselenggarakan Kongres Pendidikan di kota Solo. Kongres ini bertujuan untuk meninjau kembali dan menyempurnakan berbagai masalah pendidikan dan pengajaran terutama mengenai jenjang pendidikan, pendidikan masyarakat, perkembangan kebudayaan, perkembangan kreativitas anak-anak, hubungan sekolah dan masyarakat, pelajaran bahasa asing, dan lain sebagainya. Pokok bahasan didasarkan pada hasil kerja Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran.

Kongres ini berlangsung dalam suasana mencekam karena baru saja terjadi agresi militer pertama pada 21 Juli 1947, ketika pusat pemerintahan negara sedang dipindah ke Yogyakarta. Kongres yang diketuai Prof. Sunarja Kolopaking didampingi sekretaris Sutedjo Bradjanagara ini dihadiri oleh Presiden Sukarno yang sudah pindah dari istana Jakarta ke Yogyakarta. Tokoh-tokoh yang hadir antara lain Dr Rajiman Wedyodiningrat, Prof. Dr Sardjito, Prof. Dr Mr Supomo, Mr Wongsonegoro, Drs A. Sigit, dan Ki Hadjar Dewantara.

Kembali berbicara tentang kaitan antara pendidikan dan kebudayaan, pada saat dilangsungkan Kongres Kebudayaan 1948 di Magelang, beberapa peserta mengusulkan agar Kongres Pendidikan 1947 ini ditempatkan sebagai kongres kebudayaan pertama. Mereka berpendapat, Kongres Pendidikan IV ini pada hakikatnya adalah kongres kebudayaan juga. Perdebatan berlangsung seru

tetapi setelah Bung Hatta angkat bicara, akhirnya disepakati bahwa kongres kebudayaan yang pertama tetaplah yang diselenggarakan di Magelang pada 1948 itu, bukan Kongres Pendidikan 1947.

4. Kongres Pendidikan dan Pengajaran Antar-Indonesia

Tema

Membahas hasil kerja Panitia Pembentukan Rencana Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran.

Tempat & Tanggal

Yogyakarta, 15–20 Oktober 1949.

Tokoh/Penyelenggara

Sarmidi Mangoensarkoro.

Konteks dan Peristiwa

Sebagai tindak lanjut Kongres Pendidikan 1947, dibentuklah Badan Kongres Pendidikan pada 1948. Badan ini bertugas menyiapkan segala hal yang berkenaan dengan teknis penyelenggaraan kongres pendidikan. Lalu, pada tahun yang sama Menteri PP dan K Mr. Alisastroamidjojo membentuk Panitia Pembantu Pembentukan Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran, yang diketuai Ki Hadjar Dewantara.

Setelah kedua lembaga itu menyelesaikan tugasnya, Menteri PP dan K Sarmidi Mangoensarkoro memutuskan untuk menyelenggarakan kongres pendidikan berikutnya. Kongres diselenggarakan di ibu kota negara Yogyakarta pada 15–20 Oktober 1949 dengan nama Kongres Pendidikan dan Pengajaran Antar-Indonesia. Tujuan kongres ini ialah membahas hasil kerja Panitia Pembantu Pembentukan Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran.

Dalam kongres ini Ki Hadjar Dewantara menyampaikan pidato berjudul “Satu Bangsa Satu Kebudayaan”. Ia memaparkan antara lain konsep, kebijakan, dan strategi pendidikan dan kebudayaan yang selayaknya diterapkan di Indonesia.

Disaksikan antara lain oleh Presiden Soekarno, Ki Hadjar Dewantara (1977:184-188) menyampaikan:

“Kongres yang terhormat! Rasa bersatu yang saya gambarkan itu ialah rasa satu-jenis; dan rasa ‘satu-jenis’ inilah yang sebenarnya tetap hidup dalam jiwa kita sebagai inti kesatuan kebangsaan kita, dalam arti global dan integral. ‘Kesatuan kebangsaan’ itu harus terwujud sebagai kesatuan negara yang merdeka, namun janganlah dilupakan bahwa kemerdekaan politik akan kosong belaka bila tidak bersifat hidup dan penghidupan yang merdeka pula. Dan hidup serta penghidupan itulah dan sepenuhnya dan seluruhnya merupakan kebudayaan bangsa, yang harus ‘satu’ dan ‘merdeka’ pula. Untuk menyatakan serta memerdekakan kebudayaan bangsa kita itulah kini kita mengadakan Kongres Pendidikan Antar-Indonesia. Besok pagi akan saya jelaskan serta saya buktikan, bahwa pendidikan dan pengajaran itu adalah usaha kebudayaan semata-mata, bahwa perguruan itu ialah taman-persemaian benih-benih kebudayaan bagi suatu bangsa.

Saudara-saudara sebangsa! Dalam pertemuan antara pemimpin-pemimpin kita seluruh Indonesia, yang dilangsungkan di Yogyakarta dan Jakarta tempo hari, sudah terdapat kesatuan tekad, baik dalam usaha politik maupun dalam usaha kebudayaan. Pernyataan ‘satu negara, satu bangsa, dan satu bahasa’ berasal dari tahun 1928, tersusul dengan pernyataan-kesatuan baru, yaitu: ‘satu bendera, satu lagu kebangsaan, dan satu lambang kenegaraan’. Dua-dua pernyataan itulah yang secara singkat tetapi lengkap, tepat dan bulat, dapat kita persatukan dengan pernyataan: ‘satu bangsa, satu kebudayaan’. Untuk mewujudkan pernyataan itulah kita kini menyelenggarakan Kongres Pendidikan Antar-Indonesia ini.

Sidang yang mulia! Sebagai kami telah umumkan lebih dahulu, maka inisiatif diadakannya kongres ini telah diambil oleh Badan Kongres Pendidikan yang pada bulan Maret 1947 didirikan, sebagai hasil Kongres Pendidikan Republik Indonesia pada waktu itu di Solo. Selain itu patutlah diketahui, bahwa dari saudara-saudara di Indonesia Timur, dari pemimpin-pemimpin di pelbagai tempat di seluruh Sumatra, dari Kalimantan dan Jawa Barat, telah diterima saran-saran atau usul-usul untuk mengadakan kongres itu di ibu kota republik Yogyakarta. Sehingga muktamar pendidikan kita ini benar-benar merupakan kongres kita bersama.

Kami, seluruh panitia penyelenggara, menginsyafi benar-benar akan banyaknya kesulitan-kesulitan yang akan kami hadapi, untuk menyiapkan kongres sebesar yang dimaksud itu, dalam tempo yang amat pendeknya, dengan tiada bermodal selain keteguhan kemauan, namun kami terima tugas yang dibebankan kepada kami itu, karena keyakinan, bahwa nanti pasti akan datang bantuan-bantuan, moril dan materil, dari fihak-fihak dalam masyarakat kita, yang mengerti bahwa kepentingan pendidikan dan pengajaran adalah kepentingan bangsa dan negara. Kalau hingga kini masih ada pemimpin-pemimpin yang kurang berminat terhadap usaha pendidikan, maka hal itu disebabkan, karena kebanyakan mereka itu biasanya tertarik oleh usaha-usaha atau perjuangan, yang dalam waktu pendek dapat memberi hasil yang kongkrit, sedangkan pendidikan dan pengajaran itu adalah usaha untuk waktu yang lama, usaha *on long term*, yang nantinya akan memberi keuntungan tidak bagi para yang mengusahakan, tetapi untuk orang-orang lain, walaupun anak-cucu kita sendiri. Dalam usaha pendidikan dan pengajaran, para pengusaha tidak minta, tetapi memberi. Itulah semua kiranya yang menyebabkan di beberapa negeri biasanya sangat kurangnya persediaan belanja untuk pendidikan dan pengajaran, sedangkan inilah yang menyebabkan pula kurangnya tenaga-tenaga yang menyebarkan diri dalam lapangan perguruan.

Mengingat hal-hal ini, maka Panitia memulainya persiapannya dengan cara mobilisasi. 'Mobilisasi' dengan mengerahkan segala tenaga yang dapat digunakan hingga merupakan suatu 'tentara-damai' untuk meluaskan dan mempertinggi perguruan bagi rakyat kita. Beberapa orang kami tarik masuk lapangan kita sebagai 'anggota-anggota kehormatan', sebagai 'anggota-anggota penasihat', sebagai 'anggota- anggota pengurus', sebagai "anggota-anggota cadangan pembantu", dsb. Alangkah baiknya, apabila nanti dapat hendaknya 'tentara pendidikan dan pengajaran' itu kami tambah dengan anggota-anggota baru, di seluruh kepulauan Indonesia, untuk dapat dikonsolidir tetap menjadi 'staf angkatan pendidikan dan pengajaran', agar supaya usaha pendidikan dan pengajaran itu dapat diselenggarakan secara 'perjuangan', perjuangan dalam arti nasional, kulturil, dan sosial; perjuangan yang akan menghasilkan buah yang tetap dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Bahwa dalam mobilisasi itu

tidak saja para pengusaha pendidikan (guru-guru dan pengajar-pengajar), tetapi para cerdik-pandai (*intellektueelen*) kita masukan pula dalam rencana, mudah mengerti. Untuk pembangunan pendidikan dan kebudayaan, merekalah yang selayaknya pegang pimpinan. Golongan-golongan lain, yang dapat memberi bantuan, baik moril ataupun materiil, patut pula kita masukan dalam daftar. Ingatlah bahwa sebenarnya tiap-tiap orang sebagai ayah-ibu tentu mempunyai kepentingan dalam segala soal pendidikan dan pengajaran.

Berhubungan dengan tertariknya seluruh masyarakat dalam usaha pendidikan tadi, maka alangkah baiknya pula, bila tiap-tiap perguruan—baik yang partikelir maupun yang kepunyaan negeri—selalu dihubungkan secara erat dengan masyarakat di masing-masing lingkungannya. Bersatunya perguruan, keluarga murid dan para murid sendiri (inilah *tripusat-systeem*) dengan sendiri akan menimbulkan saling-daya antara tiga-tiganya pusat: a. perguruan akan diliputi suasana keluarga; b. keluarga akan bersuasana pendidikan; dan c. anak-anak akan berkembang secara evolusi yang normal serta tak tercerai hidupnya dari masyarakat dan kebangsaannya.

Dalam kongres kita sekarang ini, dalam sifatnya sudah dapat terwujud persatuan antara segala golongan dalam masyarakat kita: para pengusaha, para pemimpin dan pengurus, para peminat, para ahli pendidikan serta kebudayaan, para wakil-wakil resmi dari pemerintah-pemerintah di berbagai daerah Indonesia, anggota-anggota perwakilan-perwakilan rakyat, utusan golongan-golongan dengan tak dibedakan aliran-aliran agamanya; mereka semua kini hadir dan ada di tengah-tengah kita.

Sidang yang terhormat! Kadang-kadang masih terdengar suara bertanya: “Apakah tidak sudah datang waktunya segala usaha pendidikan diserahkan kepada pemerintah, karena sekarang kita sudah merdeka; tidak lagi dikuasai pemerintah penjajah? Hendaknyalah dalam hal itu diingat: 1. Dalam negara yang demokratis tidak boleh ada larangan mendirikan perguruan partikelir, asal dalam pengawasan pemerintah; 2. Tiap-tiap ideologi yang sehat dan kuat berhak memelihara ideologinya masing-masing dalam perguruan-perguruannya, yang merupakan tempat persemaian cita-citanya, baik yang bersifat keagamaan, kebudayaan, kemasyarakatan, maupun yang bertali dengan hal-hal yang

teknis-pedagogis (misalnya: ada yang memakai dasar *Arbeitsschule*, dasar *pragmatism*, dasar *Dalton system*, dasar *anthroposophisch*, dan lain sebagainya; 3. Janganlah dilupakan, bahwa zonder bantuan partikelir tidak mungkin perluasan horizontal dapat dilaksanakan dengan cepat. Dalam soal ini cukuplah kiranya, bila pemerintah mengadakan *minimum-leerplan* sebagai syarat unifikasi. Tidak saja tiap-tiap perguruan partikelir berhak untuk berbeda, tetapi berhak pula untuk dapat subsidi secukupnya, karena pemerintahlah yang tetap berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi rakyat seluruhnya.

Bagaimana caranya kita dapat dasar-dasar unifikasi, tidak dengan memperkosa hak-hak kemerdekaan dan kebebasan diri, baik diri perseorangan maupun golongan, itulah salah satu soal yang akan kita perundingkan bersama pada kongres kita sekarang ini. Yakinlah saya, akan mudah terdapatnya persetujuan, asal kita mengingat syarat-syarat persatuan sebagai yang berikut: [1]. Janganlah mempersatukan apa yang tidak bisa dipersatukan; [2]. Janganlah menyatukan apa yang tidak perlu dipersatukan; dan [3]. Kesatuan dalam dasar dan azas, dalam pokok-pokoknya cukuplah, bahkan itulah satu-satunya syarat untuk dapat menggalang persatuan yang kokoh dan abadi.”

Kongres Pendidikan dan Pengajaran prakemerdekaan (1935 dan 1937) maupun pascakemerdekaan (1947 dan 1949) merupakan tonggak sejarah dalam pendidikan di Indonesia. Dari hasil kongres itu berhasil disusun rancangan Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran. RUU tersebut akhirnya mendapat persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP).

Yang unik, UU No 4 Tahun 1950 tentang Pengajaran: Peraturan Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah ini bersejarah karena disahkan bersama oleh Pemangku Jabatan Sementara Presiden Republik Indonesia Mr Assaat dan Menteri PP dan K Sarmidi Mangoensarkoro menjadi pada 2 April 1950. Dalam perjalanan, pada 12 Maret 1954 UU kembali disahkan oleh Pemerintah RI, ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan berubah menjadi UU No 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang No 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia.

Selanjutnya, UU tentang pendidikan terus mengalami penyempurnaan sesuai perkembangan zaman. Pada 1989 lahirlah UU No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Empat belas tahun kemudian, UU tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan, lalu disusunlah Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bahwa
PENDIDIKAN
dan PENGAJARAN
itu adalah usaha kebudayaan
semata-mata, bahwa
PERGURUAN
itu adalah taman-persemaian
benih-benih kebudayaan
bagi suatu bangsa.





Konferensi pendidikan seluruh Indonesia
di Yogyakarta pada Oktober 1949.
Ki Hajar Dewantara memberikan sambutan
di depan peserta.
(Dari ANRI, IPPHOS, No. 1395)



Suasana Kongres Pendidikan dan Pengajaran Antar-Indonesia yang berlangsung pada 15-20 Oktober 1949 di Yogyakarta. Tampak Presiden Sukarno bersama Ibu Fatmawati, Guntur Soekarno Putra, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX duduk di barisan depan.

(Dari ANRI, IPPHOS, No. 1396)





Setelah Kongres Pendidikan dan Pengajaran 1949 tidak atau belum ditemukan data kongres-kongres berikutnya. Setelah jeda selama 60 tahun lebih, Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gajah Mada (UGM) menyelenggarakan Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada 2012.

Pemilihan nama kongres ini dilatarbelakangi oleh kondisi dunia pendidikan di Indonesia yang akhir-akhir dirasakan mulai mengalami kegamangan. Pasalnya, pendidikan nasional masih mencari-cari model pendidikan kebangsaan demi membangun karakter bangsa. Kegamangan inilah yang menyebabkan cita-cita Indonesia untuk membangun manusia yang merdeka seutuhnya mulai kabur, sehingga pendidikan hanya dimaknai sebagai teknik manajerial persekolahan dan menitikberatkan salah satu aspek saja, yaitu nilai-nilai kuantitatif akademik—kecerdasan.

Ki Hadjar Dewantara jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia (humanisasi), yakni proses pengangkatan manusia ke taraf insani, tataran tertinggi. Di dalamnya terdapat proses pembelajaran, yakni komunikasi eksistensi manusiawi yang otentik kepada manusia, untuk dimiliki, dilanjutkan, dan disempurnakan. Pendeknya, pendidikan adalah usaha bangsa untuk membawa manusia Indonesia keluar dari kebodohan, dengan membuka tabir aktual-transenden dari sifat alami manusia (humanis). Lebih jauh lagi beliau menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah “penguasaan diri”. Penguasaan diri demi tercapainya pendidikan yang memanusiawikan manusia. Dengan demikian akan tumbuh sikap yang mandiri dan dewasa.

Jika mencermati pemikiran Ki Hadjar Dewantara, maka para ahli bersepakat bahwa pendidikan harus memiliki tiga landasan filosofis, yaitu nasionalistik, universalistik, dan spiritualistik. Nasionalistik adalah berdasarkan pada budaya nasional; universalistik bahwa pendidikan harus berdasarkan pada hukum alam; dan spiritualistik ialah bahwa segala sesuatu merupakan perwujudan kehendak Tuhan. Prinsip dasarnya adalah kemerdekaan; merdeka dari segala hambatan cinta, sehingga kebahagiaan, keadilan, dan kedamaian tumbuh dalam diri (hati) manusia. Jika konsep pendidikan tersebut diterapkan secara tepat maka

akan tercapai tujuan negara mencerdaskan manusia Indonesia secara holistik, bukan lagi sepotong-sepotong. Dan tidak mustahil kecerdasan akal, keluhuran budi, serta karakter kebangsaan akan selalu masuk dalam setiap relung jiwa dan perilaku manusia Indonesia.

Sayangnya, konsep-konsep pendidikan yang digagas Ki Hadjar Dewantara tersebut pada saat ini mengalami semacam kebekuan. Pasalnya, ada indikasi para pelaku dunia pendidikan Indonesia kurang memahami dan mengoperasionalkan konsep pendidikan tersebut. Wujud ketidakpercayaan diri ini adalah saat kita justru lebih mengagung-agungkan konsep pendidikan negara-negara maju padahal lingkup sosial negara Barat cenderung eksploitatif dan mendidik menjadikan manusia individualis-serakah yang notabene menjauhkan diri dari cipta, rasa, dan karsa. Salah satu contohnya, sebagian pelaku pendidikan kita merasa berhasil jika anak didiknya cepat terserap di dunia (pasar) kerja, mampu memenangkan berbagai kompetisi meskipun tidak memiliki rasa kepekaan sosial. Padahal, lebih jauh dari itu, pendidikan hakikatnya ialah upaya pembangunan peradaban bangsa.

Kita semua menyadari, kebekuan-kebekuan tersebut tidak bisa dilepaskan dari globalisasi yang melanda dunia dewasa ini. Era keterbukaan ditambah lagi semakin deras arus informasi menyebabkan persaingan antarnegara semakin ketat terutama pada bidang ekonomi. Pendidikan kita di Indonesia justru ikut arus dalam pusaran globalisasi sehingga kita hanya disibukkan mengikutinya dan menempatkan kita sebagai penonton yang pasif. Akibatnya, bangsa Indonesia perlahan tetapi pasti mengalami krisis karakter yang justru menghasilkan mental-mental pragmatis, materialistis, konsumtif, dan individualis. Kita seolah terlena dalam buaian mimpi globalisasi dan belum tersadarkan bahwa upaya membangun karakter bangsa penting sebagai tameng dalam menghadapi globalisasi tanpa harus larut di dalamnya.

Globalisasi bukanlah hal yang perlu ditakuti dan dihindari. Dalam kehidupan pergaulan antar-bangsa dan negara, kita tidak bisa menutup diri. Meskipun demikian, kita harus bisa bergaul tanpa harus menjadi bangsa lain, mengikuti dan meniru bangsa lain, dan menganggap bangsa lain lebih daripada bangsa sendiri. Mental inferior kompleks ini harus dibongkar dengan adanya pendidikan

kebangsaan yang tersusun secara sadar dan terencana dalam jangka panjang.

Untuk itulah pendidikan tidak bisa dilepaskan dari pengajaran dan kebudayaan. Pendidikan adalah produk dari kebudayaan dan dengan pendidikan akan terbentuk peradaban. Maka saat ini dibutuhkan sebuah gerakan kembali meluruskan visi pendidikan untuk masa depan agar kebijakan pendidikan nasional kembali ke hakikatnya, yaitu menjadikan manusia yang merdeka. Pada satu sisi mampu berjalan beriringan dengan dunia global, pada sisi yang lain tetap mencirikan karakter kebangsaan yang kuat. Mereka yang lupa harus diingatkan, mereka yang belum tahu harus dibuat paham, agar nantinya semua gerbong pendidikan nasional mengarah pada satu tujuan, memanusiakan manusia.

Atas dasar pikiran-pikiran di atas, Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Tahun 2012 ini bermaksud mengintegrasikan kembali pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan dalam sebuah perspektif strategi kebudayaan yang komprehensif. Dengan ini diharapkan dapat dirumuskan prinsip-prinsip pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan yang saling melingkupi dan memadai bagi pengembangan peradaban Indonesia di tengah dinamika budaya internal dan tekanan budaya global.

1. Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan I

Tema

Mengembalikan Pendidikan yang Dibangun Berdasar Basis Kebudayaan.

Tempat & Tanggal

Yogyakarta, 7–8 Mei 2012.

Tokoh/Penyelenggara

PSP UGM.

Hasil

Rumusan dan Rekomendasi
Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan
Tahun 2012

Peserta Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan bersyukur karena bidang kebudayaan telah kembali ke “rumah besar” pendidikan setelah terpisah lebih dari sepuluh tahun. Kementerian ini, terhitung sejak 20 Oktober 2011 lalu, telah berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Peserta kongres menyadari bahwa pada 2010 sampai 2035, bangsa kita dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa potensi sumber daya manusia berupa populasi usia produktif yang jumlahnya luar biasa, bonus demografi (*demographic dividend*) yang harus menjadi manusia susila yang mempunyai kesadaran untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan Indonesia khususnya dan dunia umumnya, dalam arti berjiwa Indonesia dan merupakan manusia budaya Indonesia yang mempunyai keinsafan hidup berdasarkan Pancasila.

Disadari sepenuhnya bahwa pendidikan di Indonesia belum mampu membentuk karakter bangsa. Pendidikan telah menjadi barang mewah, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pendidikan telah beralih dari *public goods* (kebutuhan publik yang menjadi tanggung jawab negara) ke *private goods* (kebutuhan pribadi), sehingga pendidikan telah berubah menjadi lahan bisnis. Pendidikan menjadi pencetak manusia yang dibutuhkan pasar dan ini pun gagal karena pasar ternyata tidak mampu menyerap mereka sehingga angka pengangguran selalu meningkat dari waktu ke waktu.

Setelah mencermati pidato pembukaan Sri Sultan Hamengkubuwono X, pidato Wamendikbud Bidang Kebudayaan, pidato pembukaan Ketua Panitia, makalah pada sidang pleno dan sidang komisi, diskusi dan saran-saran selama berlangsungnya Kongres Pendidikan, Pengajaran, & Kebudayaan, tanggal 7–8 Mei 2012, di Universitas Gajah Mada, maka dapat dirumuskan hasil sebagai berikut:

Rumusan Panel Pertama:

Pendidikan pada hakikatnya harus dibangun dengan basis kebudayaan. Pendidikan yang tidak bersatu dengan kebudayaan, atau setidaknya tidak dibangun dengan basis kebudayaan demikian itu, hanya akan menghasilkan luaran-luaran pendidikan yang tidak mengenal kebudayaan, tidak memiliki budi pekerti yang luhur, tidak berakhlak mulia, tidak humanistik. Kebudayaan pada esensinya adalah buah-buah keadaban. Maka jika pendidikan diperbarui dengan basis kebudayaan itu, hasilnya adalah luaran-luaran pendidikan yang berkeadaban. Maka seharusnya pendidikan dibangun di atas konvergensi pilar-pilar kebudayaan itu supaya terjadi proses memanusiakan manusia (humanisasi). Dalam konteks pendidikan Yogyakarta, terdapat lima pilar yang harus diperhitungkan, yakni (1) Pendidikan Kraton, (2) Pendidikan Muhammadiyah, (3) Pendidikan Tamansiswa, (4) Pendidikan Pesantren, (5) Pendidikan Barat.

Renaissance dalam bidang pendidikan nasional hendaknya dibangun dengan model yang memperhatikan konvergensi pilar lokal, nasional, dan global. Sebenarnya itulah hakikat pendidikan yang disintesiskan dengan kebudayaan.

Dalam kaitan dengan hakikat kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan dan pengajaran itu, terdapat urgensi untuk membangun kerangka kebudayaan yang menempatkan nilai-nilai, sarana-prasarana kebudayaan, kelembagaan kebudayaan, SDM kebudayaan, diplomasi kebudayaan, hak-hak berbudaya, dll, dalam suatu sistem.

Rumusan Panel Kedua:

Driyarkara mengajukan empat prinsip: humanisme (membangun manusia bermartabat dan luhur dan pendidikan sebagai proses pemberadaban), hominisasi (manusia tidak cukup berhenti sebagai makhluk namun harus menjadi human), humaniora (pemanusiawian pengajaran disesuaikan dengan skema antropologis manusia dalam rangka mengembangkan rasionalitas manusia secara utuh), dan humanitas (terbangunnya kemanusiaan yang utuh yang memiliki kepekaan budaya, tanggung jawab sejarah, kreatif, dan keunggulan akademis).

Menghadapi dua krisis besar, yakni krisis kepemimpinan dan krisis ideologi sebagai akibat deformasi dan ketiadaan platform bersama, kita mesti kembali ke

Pancasila yang menopang kebinekaan dan pengutamaan kepentingan nasional. Pancasila bagi negara adalah asas tunggal dan bagi bangsa Indonesia Pancasila adalah asas bersama. Dengan mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai asas negara dan asas bangsa, maka bangsa Indonesia dapat menghadapi dan mengelola globalisasi secara tepat.

Rumusan Panel Ketiga:

Internalisasi integritas terjadi dan bertahan dalam diri apabila sosialisasi dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan konsisten dengan memberikan pengalaman hidup dan pembiasaan dengan kejujuran kepada individu-individu, pengalaman hidup dan pembiasaan bahwa kejujuran akan dihargai dan sebaliknya ketidakjujuran akan dihakimi. Untuk menjadi agen sosialisasi yang dapat mengubah kebudayaan, institusi pendidikan formal semestinya dapat memberikan pengalaman dan pembiasaan kejujuran kepada peserta didik. Dengan demikian pendidikan karakter adalah pendidikan yang menekankan pada pembentukan nilai-nilai karakter kepada anak didik.

Ada empat ciri pendidikan karakter, yaitu (i) setiap tindakan berpedoman pada nilai normatif; (ii) terdapat koherensi antara rasa percaya diri dan keberanian; (iii) adanya otonomi, mampu mengambil keputusan mandiri tanpa dipengaruhi pihak luar; (iv) keteguhan dan kesetiaan. Dengan menempatkan nilai-nilai kemasyarakatan tersebut sebagai orientasi pengembangan pendidikan formal, jurang antara praktik dalam pendidikan dan praktik sosial dapat didekatkan, dan terbangun proses sinergis antara agen di masyarakat dan di pendidikan dalam membangun integritas masyarakat. Tiga macam kejahatan masyarakat yang mengancam karakter bangsa adalah korupsi, kekerasan, dan kejahatan moral dan seksual. Sekolah (pendidikan formal) dan agama tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Harus dilakukan *social engineering* untuk membongkar dasar semua kejahatan sosial tersebut dengan merancang ulang pendidikan untuk mengatasi globalisasi dengan menguatkan kekuatan lokal.

Rekomendasi:

1. Pendidikan dan pengajaran nasional harus dilandasi jiwa Pancasila dan kebudayaan Indonesia karena tanpa kedua landasan itu pendidikan akan kehilangan arah. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional harus ditinjau kembali.
2. Untuk mengawal ideologi pendidikan nasional harus dibentuk Dewan Pendidikan Nasional, melengkapi Dewan Pendidikan yang sudah ada di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
3. Sekolah-sekolah wajib mengembangkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah menjadi bagian dari pembangunan karakter bangsa. Kecintaan kepada bahasa Indonesia dan daerah harus dimunculkan sejak usia dini melalui peningkatan minat baca yang didukung oleh tersedianya pustaka-pustaka dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang memuat kearifan lokal.
4. Peningkatan kualitas guru, dosen, dan tenaga kependidikan harus menjadi prioritas utama sejak perekrutan, penempatan, dan pengembangan.
5. Nilai-nilai budaya lokal harus diletakkan sebagai landasan kebijakan dan strategi pengembangan karakter bangsa. Perjumpaan antara budaya lokal dan budaya nasional dengan budaya global seharusnya dijadikan momentum untuk memicu munculnya sintesis baru budaya Indonesia.
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berfungsi sebagai badan perjuangan kebudayaan pembentuk manusia berbudaya Indonesia dengan melibatkan semua institusi pendidikan dan lembaga-lembaga budaya sebagai tempat persemaian kebudayaan nasional.
7. Perlu rembug nasional tentang strategi kebudayaan nasional yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam rangka pembangunan nasional berwawasan budaya.

Yogyakarta, 8 Mei 2012

Fakta, Peristiwa, dan Opini

Kongres yang diprakarsai dan diselenggarakan oleh PSP UGM dan berlangsung pada 7–8 Mei 2012 di Grha Sabha Pramana ini menghadirkan antara lain: [1]. Pembicara kunci Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X (dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr Muhammad Nuh tetapi lalu berhalangan hadir); [2]. Tokoh nasional Prof. Dr Malik Fadjar (yang mengirimkan makalah) dan Prof. Dr Sri Edi Swasono. Peserta kongres terdiri dari perwakilan PTN/PTS, guru, dosen, peneliti, mahasiswa, birokrat, legislator, politikus, dan tokoh masyarakat.

Dari rumusan hasil dan rekomendasi kongres, dua hal patut digarisbawahi. *Pertama*, ada kesan penyelenggaraan pendidikan belum dilandasi oleh jiwa Pancasila dan kebudayaan Indonesia. *Kedua*, ada kesan selama bidang kebudayaan digabungkan dengan bidang pariwisata (2000–2011), penyelenggaraan pendidikan tidak berfungsi sebagai pranata perjuangan kebudayaan pembentuk manusia berbudaya Indonesia dengan melibatkan semua lembaga pendidikan dan lembaga budaya sebagai tempat persemaian kebudayaan nasional.

Menurut hemat penulis, entah bidang kebudayaan bersatu dengan pendidikan atau berada di luar pendidikan, proses penyelenggaraan pendidikan seharusnya tetap berakar pada kebudayaan bangsa. Sebagaimana disebut dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 2, bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dengan demikian, sekalipun bidang kebudayaan memang berada dalam lingkungan pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) maupun berada di luar bidang pendidikan (dalam hal ini di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata)—atau bahkan kalaupun berdiri sendiri menjadi Kementerian Kebudayaan—penyelenggaraan pendidikan seharusnya tetap berakar pada kebudayaan bangsa.

2. Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan II

Tema

Memperkokoh Format Pendidikan Nasional yang Berkepribadian dan Berlandaskan Pancasila di Era Global.

Tempat & Tanggal

Yogyakarta, 5–6 Mei 2014.

Tokoh/Penyelenggara

PSP UGM.

Penjabaran Tema dan Peserta

Tema besar kongres ini dijabarkan ke dalam tiga subtema: [1]. Memperkokoh karakter generasi muda bangsa Indonesia melalui pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan menghadapi globalisasi; [2]. Memperkokoh nilai-nilai ke-bhinneka-tunggal-ika-an sebagai dasar kepribadian pendidikan nasional; [3]. Tantangan dalam penyusunan kurikulum untuk memperkuat nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika pada sistem pendidikan nasional. Tujuannya, untuk memperkuat format pendidikan di Indonesia dengan cara menguatkan semangat ke-bhinneka-tunggal-ika-an di Indonesia, mengingat kondisi pendidikan di Indonesia yang akan menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Kegiatan ini diikuti sekitar 500 orang peserta yang terdiri dari pengampu kebijakan, akademikus, praktisi pendidikan, guru, perwakilan instansi pemerintah, tokoh masyarakat, ormas, maupun LSM. Beberapa pembicara yang hadir antara lain Ketua MPR RI, Ketua MK, Mendikbud, dan lain-lain.

3. Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan III

Tema

Restorasi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk Peradaban Baru Bangsa Indonesia.

Tempat & Tanggal

Yogyakarta, 30 April–1 Mei 2016.

Tokoh/Penyelenggara

PSP UGM.

Penjabaran Tema

Dalam kongres ini tema utama dijabarkan ke dalam lima topik: [1]. pendidikan keluarga; [2]. pendidikan masyarakat; [3]. pendidikan sekolah; [4]. pendidikan jasmani; dan [5]. pendidikan tari. Seperti halnya kongres sebelumnya, kongres diikuti oleh para pendidik dan calon pendidik dari sekolah pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah dan pendidikan inklusi. Para peserta kongres dari kalangan pendidik secara khusus diberi kesempatan menyampaikan ide dan gagasannya dalam melakukan restorasi pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan.



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Anies Baswedan berbicara di Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan III yang berlangsung pada 30 April–1 Mei 2016 di Graha Sabha Pramana, UGM, Yogyakarta. (Dari <https://koransulindo.com>)

4. Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan IV

Tema

Refleksi 20 Tahun Reformasi Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Tempat & Tanggal

Yogyakarta, 14–15 Mei 2018.

Tokoh/Penyelenggara

UNY.

Peserta, Narasumber, dan Pelaksanaan Acara

Kongres ini dihadiri oleh terutama: perwakilan dosen pendidikan kewarganegaraan yang terhimpun dari dua belas perguruan tinggi mitra di sekitar Yogyakarta; guru-guru yang terhimpun dalam forum guru pendidikan kewarganegaraan; jajaran pemimpin UNY; dan mahasiswa pendidikan kewarganegaraan S-1 dan S-2 UNY.

Kongres dibuka oleh Sekretaris Daerah mewakili Gubernur DIY. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah DIY Gatot Saptadi membacakan pidato Gubernur DIY yang menyampaikan bahwa pada 1922 Ki Hajar Dewantoro sudah mengaitkan pendidikan dengan kebudayaan sebagai buah budi manusia melalui olah cipta, olah rasa, dan olah karya, yakni penalaran, penghayatan, dan pengamalan—atau *knowledge*, *attitude*, dan *skill*. Padahal, taksonomi Bloom baru ditemukan pada 1956 dan diperbaharui muridnya, Krathwohl, pada 2001. Ditambahkan oleh Sekretaris Daerah, dalam tiga ranah itulah terkandung totalitas potensi subjek didik yang harus dikembangkan secara terintegrasi untuk mewujudkan misi “mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang menjadi tujuan akhir pendidikan. Yang dimaksud dengan terintegrasi itu adalah dapat dicapainya keselarasan praktik pendudukan di tiga level, yaitu level menteri sebagai pengambil kebijakan, gubernur melalui dinas pendidikan sebagai pengarah-penyelar, dan guru sebagai pendidik-pembudaya untuk membangkitkan subjek didik sebagai pelaku transformasi nilai yang hakikatnya adalah rangkaian reformasi pendidikan.

Hadir sebagai narasumber/pemakalah utama: Prof. Dr Buchory, MS (Dewan Pendidikan DIY & Guru Besar UPY), Prof. Dr Wuryadi (Pakar Pendidikan), Prof. Dr dr Sutaryo, SpA(K) (Guru Besar UGM). Di samping itu diselenggarakan pula sidang komisi dengan enam pemakalah lain, yaitu: [1]. Rhoma Dwi Arya Y, MPd: Filosofi, Peraturan Perundang-undangan, dan Politik Pendidikan dan Kebudayaan Nasional; [2]. Dr. Mukhammad Murdiono, MPd: Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan dan Kebudayaan; [3]. Dr. Mami Hajaroh, MPd: Kurikulum dan Inovasi Pendidikan dan kebudayaan; [4]. Dr. Dyah Respati, MPd: Pendidik dan Sumber Daya; [5]. Halili, MA: Lingkungan Strategis Pendidikan; [6]. Anggoro Eko P, SPd: Pembudayaan dan Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada Generasi Muda.



Para pembicara Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan IV (2018) pada 14 Mei 2018 di Kampus UNY, Yogyakarta. (Dari www.uny.ac.id)

Kongres

Kebudayaan

Pemuda

Indonesia

Kongres kebudayaan/KK sudah beberapa kali diselenggarakan, namun pada 2012 diselenggarakan kongres serupa tetapi khusus untuk pemuda: Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia/KKPI. Sebenarnya, selama delapan kali KK pasca-Indonesia merdeka, masalah kebudayaan di kalangan pemuda bukan dilupakan; tidak juga bahwa mereka tidak dilibatkan baik sebagai panitia pengarah, peserta, maupun pemakalah. Sejak KK perdana, 1918, hingga 2008 topik kebudayaan pemuda dan gagasan bahwa pemuda merupakan penerus kebudayaan selalu diperbincangkan. Unsur pemuda pun selalu dilibatkan sebagai pembicara maupun panitia. Pada KK 1991 di Jakarta, Nirwan Dewanto yang masih sangat muda tampil sebagai pembicara kunci di sidang pleno.

Nama kongres ini sempat menjadi diperdebatkan. Pada rapat persiapan pertama, misalnya, disampaikan saran untuk mengganti nama kongres ini menjadi “Jambore Kebudayaan Pemuda”. Akan tetapi akhirnya yang dipilih tetap Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia.

Latar Belakang

Pemuda dipercaya sebagai kekuatan besar dilihat dari energi, stamina, dan solidaritas mereka. Dipercaya pula bahwa pemuda merupakan *agent of change*, kekuatan pembaruan. Kita tahu, Soekarno pernah mengatakan, “Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia!”

Potensi atau modal alamiah pemuda dan budaya yang bila dimanfaatkan dengan baik, dapat menjadi kekuatan yang luar biasa. Beberapa di antaranya: *Pertama*, jumlah yang relatif lebih besar daripada golongan lain, untuk memperoleh dukungan politik dan bukan sekadar sebagai *crowd* dalam aksi massa. *Kedua*, kekuatan utama kaum muda sebagai intelektual: dengan rata-rata pendidikan yang lebih tinggi, analisis lebih tajam, atau gagasan yang lebih segar dan progresif. *Ketiga*, *power* dalam arti tenaga dan stamina yang tentu diikuti *endurance*, *speed*, dan agresivitas. *Keempat*, daya adaptasi dan daya serap yang lebih tinggi pada perubahan dan dinamika zaman, via ilmu atau teknologi.

Hanya dengan beberapa potensi yang belum tereksplorasi itu, kaum muda dapat berkompetisi ketat, menyingkirkan kelemahan yang tidak cukup dalam soal modal (finansial), kekuasaan, maupun birokrasi dan kekuatan (militer). Dengan potensi itu pula, kaum muda dapat mengisi peran pembangunan khususnya di bidang kebudayaan.

Di samping beberapa hal umum di atas, dalam konteks Indonesia, beberapa hal berikut menjadi dasar pertimbangan untuk mempertemukan kembali pemuda melulu dengan sesama mereka dalam suatu kongres.

Pergerakan Kebangsaan Adalah Pergerakan Pemuda

Boedi Oetomo sebagai organisasi yang lahir pada 1908 mengawali kebangkitan bangsa Indonesia (kebangkitan nasional). Mereka hadir sebagai pemuda-pemudi yang siap berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pada 28 Oktober 1928, pemuda-pemudi Indonesia, putra-putri terbaik bangsa saat itu, mengikrarkan diri dengan sumpah (janji) penting yang sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia, yakni Sumpah Pemuda. Sesuai namanya, Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda. Mereka kemudian menjadikannya sebagai dasar untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Para pemuda tidak lagi berjuang sendiri, melainkan bersama-sama. Sumpah Pemuda tidak lahir begitu saja. Banyak hal yang melandasi tekad para pemuda untuk bersatu. Mereka berpikir tidak akan bisa membuat Indonesia merdeka jika berjuang di kelompok sendiri.

Kegagalan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia membuat mereka sadar bahwa rasa nasionalisme harus dipadukan. Karena itu, diadakanlah Kongres Pemuda I dan II. Mereka menjadi satu, menjadi “Pemuda Indonesia”. Semangat persatuan para pemuda dulu harus diikuti pemuda masa kini. Yaitu, dengan mengisi kemerdekaan.

Sejarah kemerdekaan Indonesia telah membuktikannya, perjuangan pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan adalah berkat perjuangan kaum muda pada saat itu. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1966 memang berhasil digagalkan angkatan bersenjata, namun tanpa peran pemuda dan ormas lainnya keberhasilan ini tentu tidak akan berjalan lancar. Tahun inilah awal berdirinya pemerintahan Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto. Pemerintahan Soeharto memang menunjukkan perkembangan bagi bangsa Indonesia. Kemakmuran rakyat meningkat, kesejahteraan mulai tampak. Namun kekuasaan Soeharto ternyata lebih mengedepankan asas kekeluargaan; pemerintahan Orde Baru pun yang disebut-sebut sebagai pemerintahan rapuh dan keropos akhirnya jatuh di saat krisis moneter melanda Indonesia.

Pergerakan Pemuda kembali menorehkan sejarah melalui gerakan Reformasi. Bersatunya pemuda dan mahasiswa berhasil membuat Soeharto mundur; era otoriter pun berakhir, beralih ke era reformasi.

Gerakan Pemuda sebagai Gerakan Politik?

Gambaran di atas menunjukkan pergerakan pemuda Indonesia didominasi oleh gerakan-gerakan politik/non-budaya. Dari awal abad XX hingga Indonesia merdeka, digambarkan dalam catatan sejarah bagaimana anak-anak manusia berusia 20-an tahun berjuang, melawan, dan tegak berdiri di hadapan kekuatan kolonial; dan pada akhirnya Indonesia tegak berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Begitupun dalam aksi sosial, yang antara lain dilakukan pelbagai bond kepemudaan saat itu, para pemuda mampu mengikat diri menjadi sebuah kekuatan bertenaga untuk melawan kekuasaan pemerintah kolonial.

Tapi, sebagai kekuatan politik, pemuda-pemuda itu terhimpun dalam wadah-wadah yang sangat profesional di bidang/keahliannya masing-masing. Di wilayah ini, yang bermain dan berperan pun tidak lagi seluruhnya pemuda. Di perjalanan berikutnya, catatan-catatan utama sejarah dengan cermat memberi kita pembongkaran terhadap kesucian dan keagungan pemuda dalam gerakannya.

Saya kira bacaan posisional dari sejarah pemuda di atas cukup memadai untuk menjadi tolakan melihat berbagai bentuk gerakan pemuda setelah '74, '78, '82, '89, dan seterusnya. Semua itu merupakan pengukuhan penting terhadap peran kaum muda dalam memperjuangkan idealisme bangsa.

Tapi sayang, setelah era reformasi pemuda terkesan ideologis, pragmatis, bahkan materialistis. Aksi dan gerakannya kurang fokus, tidak memiliki visi bersama, dan bahkan terkotak-kotak. Disebabkan tidak adanya arah yang jelas ataupun kepedulian terhadap nasib bangsa. Oleh sebab itu diperlukan pengenalan kembali fungsi dan peran pemuda dalam membangun bangsa, yang sebelumnya tidak pernah absen menorehkan tinta emas. Perjuangan pemuda pun harus bergulir sesuai konteks dan zamannya.

Gerakan Pemuda: Peran dalam Ekonomi & Kebudayaan

Betapa pentingnya peran pemuda dalam pergerakan kebangsaan tidaklah diragukan. Sebab itulah, pemuda pada dasarnya harus ada dan mutlak adanya. Sebab pemuda sebenarnya merupakan sosok yang paling memiliki kekuatan untuk mengarungi sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara ke depan. Setidaknya ada tiga pilar penting dalam bangsa ini yang menjadikan pemuda harus bergerak dan

berkarya. Walaupun tidak mengesampingkan elemen-elemen bangsa lainnya. Ketiga pilar tersebut adalah pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan bangsa.

Pendidikan adalah pilar yang bersifat primer bagi pemuda abad XXI. Kebutuhan pendidikan bagi pemuda tidak dapat ditolak lagi, karena bangsa ini membutuhkan sumber daya manusia yang cerdas dan andal dalam mengelola bangsa, sehingga tidak berlebihan jika pendidikan menjadi hal yang wajib dan mendasar yang harus diikuti oleh pemuda.

Selanjutnya, pemuda harus menjadi salah satu aktor dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian bangsa. Pemuda bisa berkontribusi dalam bidang pengembangan kewirausahaan di segala bidang. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya sumber daya alam, maka sudah selayaknya pemuda berinovasi terhadap kekayaan tersebut, jangan sampai menjadi pemuda yang konsumtif belaka.

Di pilar terakhir, pemuda harus menunjukkan identitas bangsa melalui kebudayaan; kebudayaan harus menjadi wilayah karya pemuda. Budaya bangsa adalah karakter bangsa; maka, pemuda yang berbudaya selayaknya memiliki karakter bangsa tersebut. Tanpa adanya bingkai nilai sosial-budaya yang sehat dan kuat, keinginan menjadikan bangsa memiliki keberlanjutan adalah impian seorang paranonia. Bahkan Socrates mengatakan, gejala kematian bangsa identik dengan memudarnya atau tereliminasinya budaya bangsa itu sendiri. Diharapkan, pemuda menjadi *agent of change*, menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik; dan perubahan ini memberikan solusi bagi permasalahan bangsa.

Tujuan

1. Membangun tonggak kebangkitan pemuda dalam pembangunan kebudayaan dan pembangunan bangsa pada umumnya.
2. Memperkuat posisi dan peran pemuda untuk menjadi pilar dan agen pembangunan bidang kebudayaan yang kreatif, andal, dan memiliki integritas dalam memajukan peradaban bangsa Indonesia dan dunia.
3. Membangun visi dan langkah bersama yang terpadu dalam

memperkuat posisi kebudayaan sebagai panglima dalam pembangunan Indonesia baru.

4. Membangun jaringan kerja pemuda Indonesia antardaerah dan di berbagai negara, sehingga mampu mendukung dan memperkuat pembangunan karakter bangsa, ketahanan budaya, dan diplomasi budaya demi memapankan posisi penting Indonesia dalam pembangunan peradaban dunia.

Tema

Indonesia Aku Bangga: Membangun Karakter, Kreativitas, dan Solidaritas.

Tempat & Tanggal

Jakarta, 6–9 November 2012.

Tokoh/Penyelenggara

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hasil

Rumusan

Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia

Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, 6–9 November 2012 mengusung tema: “Indonesia Aku Bangga: Membangun Karakter, Kreativitas, dan Solidaritas Bangsa”. Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono, didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh dan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti.

Setelah mengikuti empat sarasehan dengan berbagai diskusi yang berkembang, kongres ini menyepakati beberapa hal berikut:

1. Pemuda dapat dilihat sebagai sebuah kekuatan besar dari aspek

energi, stamina, dan solidaritas untuk dapat berperan menjadi agen perubahan terutama dalam bidang budaya.

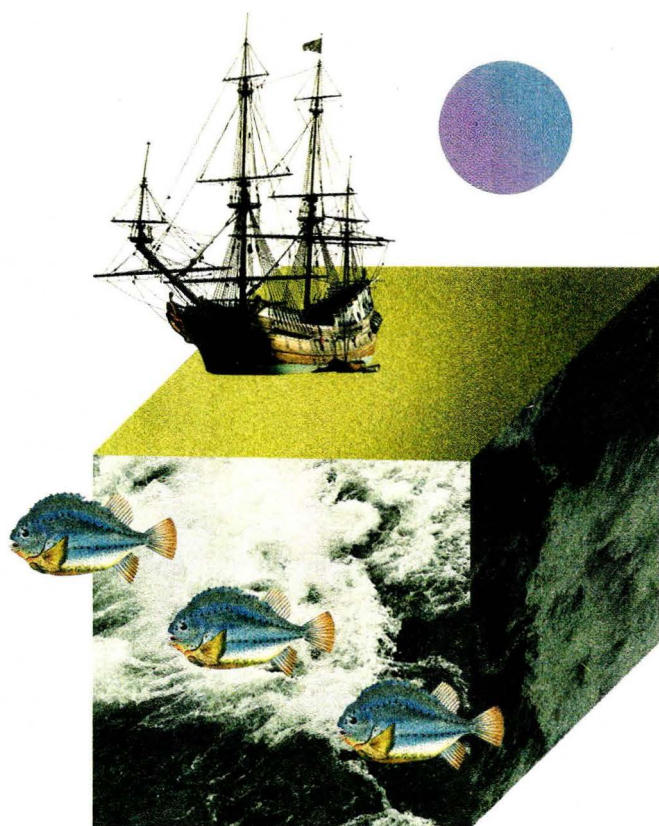
2. Pendidikan karakter bagi pemuda adalah pilar yang bersifat primer bagi pemuda di abad XXI. Hal ini tidak dapat ditolak karena bangsa ini membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, andal, serta punya identitas kebangsaan dalam mengelola masyarakat masa depan.
3. Kebudayaan merupakan bagian dari misi pemuda untuk berkarya dan karena budaya bangsa juga merupakan karakter bangsa, maka pemuda yang berbudaya seyogianya memiliki karakter daripada bangsa tersebut.
4. Tanpa bingkai nilai sosial budaya yang sehat dan kuat, keinginan menjadikan bangsa yang memiliki keberlanjutan dalam membuat suatu perdaban adalah kemustahilan.
5. Film dengan nilai-nilai budaya lokal langka ditemukan di Indonesia. Jadi, merupakan peluang bagi pemuda untuk bisa mengembangkan industri perfilman. Sebab, masih banyak sekali budaya Indonesia yang belum tersentuh oleh industri ini.
6. Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia ini merupakan momentum bagi kebangkitan pemuda untuk mengambil peran dalam gerakan kebudayaan serta menjadi tonggak kebangkitan pemuda dalam pembangunan kebudayaan dan pembangunan bangsa pada umumnya.
7. Indonesia kaya akan budaya dan tersebar di berbagai pelosok daerah. Namun, belakangan kebudayaan asing masih terus merasuk ke kalangan generasi muda. Kebudayaan haruslah dilihat sebagai “panglima” dalam pembangunan Indonesia yang sedang berkembang pada saat ini.
8. Komunikasi antara pemerintahan pusat dan daerah dalam bidang kebudayaan hendaknya bisa sinergis.

Rekomendasi

1. Sebagai sarana ekspresi yang positif sekaligus pembentuk jati diri bangsa ke depan, perlu dibentuk suatu wadah kreativitas dalam berbagai aras kebudayaan bagi para pemuda, baik di pusat maupun di daerah.
2. Perlu dibentuk suatu wadah untuk aktivitas yang lekat dengan pemahaman kebudayaan di kalangan para pemuda.
3. Perlu agar nilai-nilai budaya lokal menjadi dasar landasan bagi pengembangan karakter pemuda, karena perjumpaan antara budaya lokal dan budaya nasional dengan budaya global seharusnya dapat dijadikan momentum untuk memicu sintesis baru budaya bagi para pemuda di Indonesia.
4. Perlu diwujudkan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan pemuda dalam bidang kebudayaan di daerah.
5. Dalam rangka membangun keharmonisan dan soliditas pemuda dalam bidang kebudayaan, perlu dilakukan dialog secara berkesinambungan.
6. Peran serta perempuan dalam laju kemandirian serta kemajuan bangsa perlu ditingkatkan.
7. Demikian hasil rumusan serta rekomendasi Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia Tahun 2012.

Jakarta, 9 November 2012

Tim Perumus.



PEMUDA DIPERCAYA

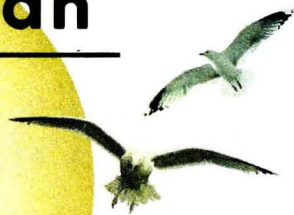
sebagai kekuatan

besar dilihat

dari energi,

stamina, dan

SOLIDARITAS MEREKA.





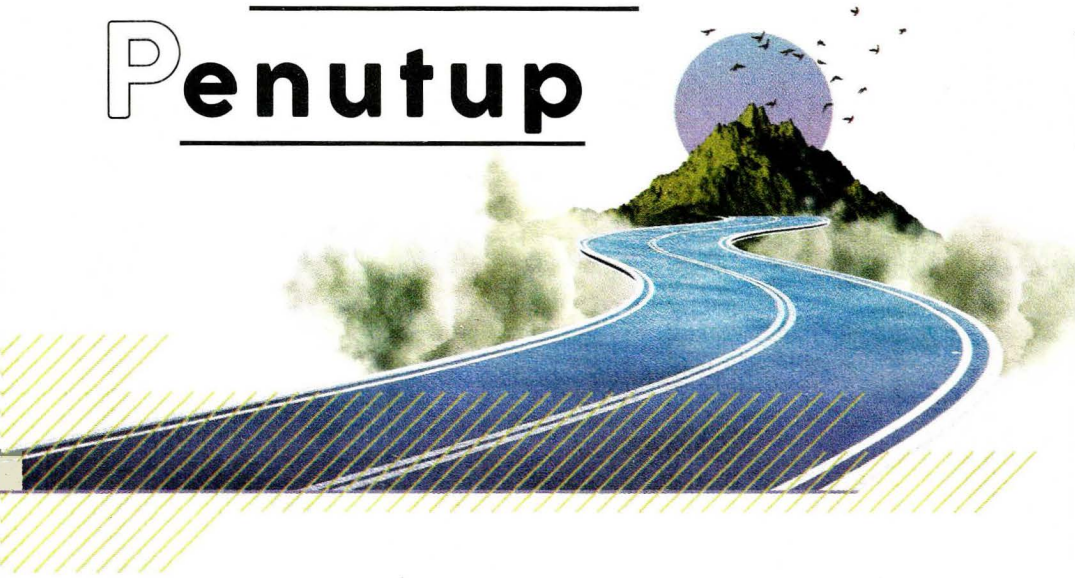
Peserta Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia

Para pemuda yang menjadi peserta
Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia (KKPI)
pertama yang berlangsung 6-9 November 2012
di Hotel Borobudur, Jakarta.
(Dari Dokumentasi Ardiansyah Farzana)





Catatan Penutup



Sejak bangsa Indonesia lahir dan menyepakati bahwa Pancasila dipilih sebagai dasar dan falsafah hidup bersama, belum pernah diselenggarakan suatu forum kongres untuk memperbincangkan serta memperdalam hal itu. Langkah penting sudah diprakarsai oleh Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada/PSP UGM pada 2009 dan hingga kini telah terselenggara sepuluh kali Kongres Pancasila.

Setelah Indonesia memasuki masa Reformasi, Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa seharusnya sudah menyatu dalam diri setiap generasi bangsa. Namun, ternyata, belakangan ini dirasakan mulai diabaikan. Untuk mengingatkan kembali komitmen yang telah dibangun

oleh para pendiri bangsa, dicanangkanlah empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui sepuluh kali kongres untuk menghimpun pandangan masyarakat tentang penanaman nilai-nilai Pancasila, PSP UGM berhasil merumuskan berbagai pemikiran, rekomendasi, deklarasi, dan rencana aksi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sementara itu, masalah pendidikan dan pengajaran juga perlu dibincangkan dalam forum kongres. Pendidikan sebagai proses pembudayaan penanaman nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai budaya bangsa, perlu dikembangkan sesuai perkembangan zaman agar proses pendidikan dan pembudayaan menemukan formula dan metode yang tepat guna diterapkan dalam pendidikan dalam keluarga, sekolah formal, masyarakat, dan media massa. Dalam hal ini, UGM dan Direktorat Jenderal Kebudayaan telah menyelenggarakan Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, yang juga melahirkan sejumlah pokok pikiran, rekomendasi, dan rencana aksi.

Bidang lain yang juga terkait erat dengan masalah Pancasila, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa/YME serta komunitas adat dan tradisi. Juga masalah kebudayaan di kalangan generasi muda—yang kini ditengarai melempem, tidak mampu menjadi agen perubahan, dan terjajah oleh kebudayaan asing.

Keempat kongres yang diselenggarakan itu—Kongres Pancasila; Kongres Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan YME serta Komunitas Adat dan Tradisi; Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan; serta Kongres Kebudayaan Pemuda—merupakan respons atas masalah yang berkembang di masyarakat; diharapkan, kita bersama anggota warga bangsa yang lain peduli dan ikut memikirkan bagaimana agar nilai-nilai luhur Pancasila bisa terbatinkan dan dihidupi terutama oleh generasi muda dan oleh generasi penerus bangsa.

Daftar Pustaka

- Bradjanagara, Sutedjo. 1956. *Sedjarah Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Badan Kongres Pendidikan Indonesia.
- Dewantara, Ki Hadjar. 1977. *Bagian I Pendidikan*, cetakan kedua, Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Hadiwijono, Harun. 2006. *Kebatinan dan Injil*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Pusat Sejarah TNI. 2009. *Komunis di Indonesia Jilid IV: Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-sisanya (1965–1981)*. Jakarta: TNI.
- Wahono, Francis. 2009. “Belajar dari Pendidikan ala Sekolah Rakyat Pancasila”, dalam A Ferry T Indratno (ed.), *Negara Minus Nurani: Esai-esai Kritis Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Tentang Penulis

Nunus Supardi bin Karsodimedjo lahir di Madiun, 19 Agustus 1943. Setelah lulus sekolah rakyat/SR (1956), sekolah guru bantu/SGB (1959), dan sekolah guru atas/SGA (1962) di kota kelahirannya, ia melanjutkan studi ke Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang Cabang Madiun. Ia memilih masuk Fakultas Keguruan, Sastra, dan Seni (FKSS) Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan meraih gelar sarjana muda pada 1970. Nunus lantas menjadi asisten dosen merangkap Kepala Tata Usaha FKSS (1965–1973). Ia pindah ke Jakarta pada 1973.

Nunus menjadi staf di Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Perjalanan kariernya di lembaga kebudayaan ini, antara lain sebagai Kepala Bagian Perencanaan (1985–1993), Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan (1993–1999), dan Direktur Direktorat Purbakala (1999–2001). Setelah itu, ia dipercaya menjadi Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (5 Februari–14 November 2001). Sebelum memasuki purnabakti pada 2003, Nunus memangku jabatan sebagai Sekretaris Utama Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, sebuah Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND).

Di bidang kebudayaan, Nunus pernah menjabat Sekretaris Panitia Pelaksana Kongres Kebudayaan 1991 dan anggota Panitia Pengarah Kongres Kesenian Indonesia 1995 serta Kongres Kebudayaan 2003, 2008, dan 2013. Sejak 2009 hingga kini ia masih duduk sebagai anggota Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia. Selain itu, ia pernah ditugasi untuk menjadi Koordinator Penyelenggaraan Festival Persahabatan Indonesia-Jepang (Indonesia–Nihon Yukosai) di Jepang (1996–1997).

Setelah pensiun, Nunus masih aktif, baik sebagai Ketua I Badan Kerjasama Kesenian (BKKI) dan Ketua II Lingkar Budaya Indonesia (LBI). Ia juga salah satu pendiri Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI). Pada 2005–2008 ia menjadi anggota Lembaga Sensor Film (LSF), kemudian mulai 2009 menjabat Wakil Ketua LSF 2009–sekarang. Pengalaman lain, namanya

tercatat sebagai anggota Dewan Pakar Asosiasi Museum Indonesia (AMI) dan anggota Tim Ahli Panitia Nasional Pengangkatan Benda Isi Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Departemen Kelautan dan Perikanan (2004–2009). Juga menjadi salah satu anggota Dewan Juri Apresiasi Film Indonesia (AFI) dan anggota Panitia Seleksi Film Edukatif Kultural pada 2012.

Sejumlah karya tulis yang sudah ia terbitkan, antara lain: *Gedung Pameran Seni Rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* (1998); *Persahabatan Indonesia-Jepang* (1998); *Pedoman Merehabilitasi Gedung Bersejarah* (terjemahan, 2000); *Kongres Kebudayaan Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka* (2003); *Pendidikan Karakter Bangsa di Lingkungan Birokrasi* (Ketua Tim, 2004); *Kongres Kebudayaan 1918–2003* (edisi revisi, 2007); *Sejarah Kelembagaan Kebudayaan di Pemerintahan dan Dinamikanya* (Ketua Tim, 2004); *Lima Tahun Otonomi Bidang Kebudayaan* (Ketua Tim, 2006); *Pendidikan Apresiasi Budaya di Lingkungan Pesantren* (Ketua Tim Peneliti, 2007); *50 Tahun Tugu Nasional/Monumen Nasional* (Ketua Tim, 2011); *Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintah: Dari Masa ke Masa* (2013); *Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan 1918–2013* (2013); *Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia: Impian Lama yang Belum Terwujud* (2014); *Balai Budaya: Riwayatmu Dulu, Kini, dan Esok* (2015); *Seabad Sensor Gambar Idoep di Nusantara 1916–2016* (2016); *Melacak Jejak Direktur Jenderal Kebudayaan* (2016); *Deklarasi Hari Museum Indonesia* (2016); *Bela Budaya Buku I dan Buku II* (2017).

Beberapa artikel yang ia tulis terbit di berbagai media massa dan antologi, misalnya: *Ranah Ilmu Budaya* (2004); *Archaeology: Indonesian Perspective* (2006). Ia menjadi salah satu penulis buku *Kapal Karam: Abad Ke-10 di Laut Jawa Utara Cirebon* (2008); *Sejarah Permuseuman di Indonesia* (2011); *Indonesia dalam Arus Sejarah* (2011, sembilan jilid); *Sejarah Sensor Film di Indonesia* (2011); *Arkeologi untuk Publik* (2012); dan *77 Tahun Wardiman Djojonegoro* (2013). Selain itu, ia juga menjadi narasumber penulisan buku *Refleksi Pers Kepala Daerah Jakarta 1945–2012* (2013).

Bianglala Budaya Jilid 1-5 merangkum perjalanan bangsa Indonesia dalam berkongres tentang bidang-bidang di bawah payung besar kebudayaan. Perjalanan ini bermula seratus tahun yang lalu, saat Indonesia belum merdeka, dan membuahkan butir-butir pemikiran putra dan putri bangsa—mulai dari tentang kebudayaan itu sendiri hingga tentang Pancasila, masyarakat adat, ilmu pengetahuan, bahasa, sastra, dan banyak lagi.

Nunus Supardi, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan (1993-1998), Direktur Purbakala (1998-2000), Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (2000-2001), Sekretaris Utama Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (2001-2003), tak henti mencurahkan perhatian terhadap kebudayaan selepas masa pensiunnya. Ia mengumpulkan data dan arsip yang menakjubkan tentang wajah Indonesia yang kurang mendapat perhatian khalayak. Wajah ini menggambarkan untaian upaya kolektif untuk merawat dan memajukan bangsa lewat kebudayaan, baik oleh kaum pergerakan era kolonial, para bapak pendiri bangsa, kalangan cendekia, budayawan, seniman, maupun lain-lain yang memiliki kepedulian. Bagi generasi kini dan nanti, buku ini menjadi pintu masuk menuju penjelajahan lebih jauh demi kemungkinan-kemungkinan baru untuk memajukan Indonesia.

Prof. Dr. Susanto Zuhdi (sejarawan/dosen UI):

Buku ini mengajak kita untuk melihat benang merah keindonesiaan. Begitu panjangnya periode ke periode yang penuh dinamika. Dari sini kita dapat melihat seperti apa benang merah itu dan bagaimana mengatasinya jika benang merah itu putus; bagaimana menyambungkannya kembali. Dan, dari buku ini sejarawan dapat menggunakan untuk merangkum berbagai hal tentang kebangsaan dan kesukubangsaan.

